

**POLA INTERAKSI TALIBAN DENGAN NGO YANG MERESPONS ISU
DISKRIMINASI GENDER DI AFGHANISTAN TAHUN 2021-2025**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

SAVIRA ANANDA PUTRI

21323163

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2026

**POLA INTERAKSI TALIBAN DENGAN NGO YANG MERESPONS ISU
DISKRIMINASI GENDER DI AFGHANISTAN TAHUN 2021-2025**

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

SAVIRA ANANDA PUTRI

21323163

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2026

HALAMAN PENGESAHAN

POLA INTERAKSI TALIBAN DENGAN NGO YANG MERESPONS ISU DISKRIMINASI GENDER DI AFGHANISTAN TAHUN 2021 - 2025

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Pada Tanggal

15 Juni 2026

Mengesahkan
Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Ketua Program Studi



Karina
Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji

- 1 Masitoh Nur Rohma, S.Hub.Int., M.A.
- 2 Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.
- 3 Khairul Munzilin, S.IP., M.A.

Tanda Tangan

Masitoh
Karina
Khairul

Surat Pernyataan Integritas Akademik

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Savira Ananda Putri

Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 16 April 2003

Alamat : JL. PATRIOT KP DUA

NIM : 21323163

Program Studi : Hubungan Internasional

Dengan ini menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa seluruh karya akademik yang saya hasilkan selama melaksanakan perkuliahan di Program Studi Hubungan Internasional adalah karya saya sendiri yang dikerjakan secara jujur dan independen dengan:

1. Tidak menggunakan jasa pihak ketiga (joki) dalam pengerjaan karya akademik atau menjadi pihak ketiga dalam pengerjaan karya akademik mahasiswa lain. Semua kontribusi yang telah diberikan oleh pihak lain dalam penulisan karya akademik saya telah sesuai dengan aturan dan tercantum dengan benar.
2. Tidak melakukan plagiasi yang berupa pengakuan atas hasil karya akademik orang lain. Segala gagasan atau data yang didapatkan dari karya atau pemikiran orang lain telah melalui proses parafrase dan dicantumkan pada sitasi.
3. Tidak melakukan manipulasi menggunakan kecerdasan buatan atau perangkat lunak otomatis lainnya untuk pengerjaan hal substansial dalam penulisan karya akademik.

Apabila di masa mendatang setelah kelulusan saya, ditemukan informasi yang membuktikan bahwa salah satu atau sebagian karya akademik saya tidak merupakan hasil kerja saya sendiri dan/atau merupakan pelanggaran atas pernyataan saya di atas, saya bersedia menerima konsekuensi yang berlaku sesuai dengan regulasi yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 29 Mei 2026



Savira Ananda Putri

DAFTAR ISI

SKRIPSI	1
HALAMAN PENGESAHAN	3
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	4
DAFTAR ISI	5
ABSTRAK	7
BAB 1	
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Cakupan penelitian	7
1.5 Tinjauan Pustaka	9
1.6 Kerangka Pemikiran	12
1.7 Argumen Sementara	16
1.8 Metode Penelitian	18
<i>1.8.1 Jenis Penelitian</i>	<i>18</i>
<i>1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian</i>	<i>18</i>
<i>1.8.3 Metode Pengumpulan Data</i>	<i>18</i>
<i>1.8.4 Proses Penelitian</i>	<i>19</i>
1.9 Sistematika Pembahasan	19
BAB 2	20
2.1. Kepemimpinan Taliban Di Afghanistan	20
2.2. Isu Diskriminasi terhadap Perempuan Afghanistan di Bawah Kepemimpinan Taliban 2021-2025	23
2.3 Kemunculan dan Peran NGO lokal dan Internasional	28
2.3.1 Women For Afghan Women	29
2.3.2 Afghan Women's Network	31
2.3.3 Medica Afghanistan	33
BAB 3	36
3.1. Faktor-faktor yang Membentuk Pola Interaksi Taliban-NGO	36
<i>3.1.1 Issue Area</i>	<i>37</i>
3.1.2 NGO Characteristics	41
3.1.3 State Characteristics	46
3.2 Pola Interaksi Taliban-NGO dalam isu Diskriminasi Perempuan	56
3.2.1 Pola Conflict	57
3.2.2 Pola Cooperation	62
3.2.3 Pola Cooptation	67
BAB 4	73
4.1. Kesimpulan	73

4.2 Rekomendasi	78
DAFTAR PUSTAKA	79

ABSTRAK

Penelitian ini membahas pola interaksi antara Taliban dan Non-Governmental Organizations (NGO) dalam merespons isu diskriminasi gender di Afghanistan pada periode 2021–2025. Fokus dari penelitian ini adalah bagaimana Taliban sebagai pemerintah *de facto* berinteraksi dengan NGO yang memperjuangkan perlindungan hak perempuan di tengah kebijakan diskriminatif terhadap perempuan Afghanistan. Penelitian ini menggunakan kerangka pemikiran *NGO's Interactions with States* dari Sarah S. Stroup yang membagi pola hubungan negara dan NGO ke dalam empat bentuk, yaitu *conflict*, *cooperation*, *competition*, dan *cooptation*. Argumen sementara penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan Taliban dan NGO cenderung didominasi pola konflik akibat perbedaan nilai mengenai hak perempuan, namun tetap terdapat kerja sama terbatas dalam sektor kemanusiaan dan kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Taliban menerapkan berbagai pembatasan terhadap perempuan, seperti larangan pendidikan, pembatasan pekerjaan dan aktivitas NGO perempuan. Kondisi tersebut mempengaruhi operasional NGO seperti Women for Afghan Women, Afghan Women's Network, dan Medica Afghanistan. Meski menghadapi tekanan dan regulasi ketat, NGO tetap berupaya mempertahankan layanan kemanusiaan dan advokasi hak perempuan melalui strategi adaptasi dan kerja sama terbatas dengan otoritas Taliban.

Kata-kata kunci: Taliban, NGO, perempuan Afghanistan, diskriminasi gender.

ABSTRACT

This study examines the interaction patterns between the Taliban and Non-Governmental Organizations (NGOs) in responding to gender discrimination in Afghanistan during the 2021–2025 period. The focus of the study is on how the Taliban, as the *de facto* government, interacts with NGOs advocating for women's rights amidst discriminatory policies against Afghan women. This study uses Sarah S. Stroup's *NGO Interactions with States* framework, which divides state-NGO relations into four patterns: *conflict*, *cooperation*, *competition*, and *cooptation*. The study's preliminary arguments indicate that the relationship between the Taliban and NGOs is dominated by conflict due to differing values regarding women's rights, although limited cooperation remains in the humanitarian and health sectors. The results show that the Taliban imposes restrictions on women, such as a ban on education, restrictions on employment, and restrictions on the activities of women's NGOs. These conditions impact the operations of NGOs such as Women for Afghan Women, Afghan Women's Network, and Medica Afghanistan. Despite facing pressure and strict regulations, NGOs continue to strive to maintain humanitarian services and women's rights advocacy through adaptation strategies and limited cooperation with Taliban authorities.

Keywords: Taliban, NGOs, Afghan women, gender discrimination

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Isu kesetaraan gender telah menjadi salah satu perhatian utama dalam diskursus global mengenai hak asasi manusia dan pembangunan internasional. Berbagai instrumen internasional seperti *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) serta *Sustainable Development Goals* (SDGs) secara eksplisit menekankan pentingnya perlindungan dan pemberdayaan perempuan sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan (UN Women 2019, 3). Dalam kerangka tersebut, perempuan tidak hanya dipandang sebagai kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan, tetapi juga sebagai aktor penting dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Namun demikian, meskipun telah terdapat kemajuan normatif di tingkat internasional, praktik diskriminasi terhadap perempuan masih terus berlangsung di berbagai belahan dunia dengan karakteristik yang beragam (International Labour Organization 2018, 7).

Diskriminasi terhadap perempuan tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga memiliki implikasi struktural yang luas terhadap stabilitas sosial dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Keterbatasan akses perempuan terhadap pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan menyebabkan rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan nasional, yang pada akhirnya menghambat potensi pertumbuhan ekonomi (World Bank 2020, 12). Selain itu, diskriminasi gender juga berkontribusi terhadap reproduksi ketimpangan sosial yang

berkelanjutan, di mana perempuan cenderung berada dalam posisi subordinat dalam struktur sosial. Oleh karena itu, upaya untuk mengatasi diskriminasi terhadap perempuan tidak hanya menjadi isu moral, tetapi juga menjadi kebutuhan strategis dalam pembangunan global (UN Women 2019, 5).

Dalam konteks tersebut, organisasi masyarakat sipil khususnya *Non-Governmental Organizations* (NGO) memainkan peran yang sangat penting dalam merespons berbagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan. NGO tidak hanya berfungsi sebagai penyedia layanan bagi kelompok rentan, tetapi juga sebagai aktor advokasi yang berupaya mendorong perubahan kebijakan di tingkat nasional dan internasional (Kaldor 2013, 56). Peran NGO menjadi semakin signifikan terutama dalam konteks negara yang mengalami konflik atau memiliki kapasitas institusional yang lemah, di mana negara tidak mampu memberikan perlindungan yang memadai bagi warganya. Dalam situasi seperti ini, NGO sering kali menjadi aktor utama yang mengisi kekosongan peran negara dalam memberikan layanan sosial dan perlindungan hak asasi manusia (Ahmed & Potter 2006, 34).

Namun demikian, hubungan antara negara dan NGO tidak selalu berjalan harmonis. Dalam banyak kasus, terutama di negara dengan rezim otoriter atau semi-otoriter, NGO justru menghadapi berbagai bentuk pembatasan dan tekanan dari pemerintah. Coston menjelaskan bahwa hubungan antara pemerintah dan NGO berada dalam spektrum yang dinamis, mulai dari hubungan yang bersifat konflik hingga kerja sama. Hubungan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti sistem politik, kepentingan negara, serta karakteristik isu yang diangkat oleh

NGO. Dengan demikian, interaksi antara negara dan NGO tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai hubungan yang selalu antagonistik atau selalu kooperatif.

Untuk memahami dinamika tersebut, Stroup mengembangkan kerangka analisis yang mengkategorikan interaksi antara negara dan NGO ke dalam empat pola utama, yaitu *conflict*, *cooperation*, *competition*, dan *cooptation*. Keempat pola ini dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu *issue area*, *NGO characteristics*, *state characteristics*, dan *resource flows*. Dalam konteks isu yang sensitif secara politik dan ideologis, seperti hak perempuan, interaksi antara negara dan NGO cenderung lebih konfliktual karena adanya perbedaan nilai dan tujuan antara kedua aktor tersebut.

Afghanistan merupakan salah satu contoh paling kompleks dalam konteks hubungan antara negara dan NGO dalam isu diskriminasi terhadap perempuan. Taliban pertama kali muncul pada pertengahan 1990-an sebagai gerakan Islam konservatif yang berupaya mengembalikan stabilitas Afghanistan setelah periode perang saudara yang panjang. Pada tahun 1996, Taliban berhasil menguasai Kabul dan mendirikan Emirat Islam Afghanistan, yang kemudian menerapkan kebijakan berbasis interpretasi ketat terhadap hukum Islam (Rashid, 2000, 70). Pada periode kekuasaan tersebut, perempuan mengalami pembatasan yang sangat ketat, termasuk larangan untuk mengakses pendidikan, bekerja di sektor publik, serta pembatasan mobilitas di ruang publik (Human Rights Watch 2001,15).

Kebijakan tersebut tidak hanya mencerminkan ideologi Taliban, tetapi juga membentuk struktur sosial yang menempatkan perempuan dalam posisi

subordinat. Setelah runtuhnya rezim Taliban pada tahun 2001 akibat intervensi internasional, perempuan Afghanistan mulai memperoleh kembali akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Namun, kemajuan tersebut tidak berlangsung lama. Pada Agustus 2021, Taliban kembali mengambil alih kekuasaan di Afghanistan, yang kemudian diikuti oleh penerapan kembali kebijakan yang membatasi hak-hak perempuan secara signifikan (Human Rights Watch 2022, 5).

Sejak kembali berkuasa, Taliban menerapkan berbagai kebijakan yang secara sistematis membatasi partisipasi perempuan dalam kehidupan publik. Perempuan dilarang mengakses pendidikan menengah dan tinggi, dibatasi dalam bekerja, serta diwajibkan mematuhi aturan ketat terkait mobilitas dan penampilan di ruang publik (UNAMA 2023, 8). Taliban melalui juru bicaranya, Zabihullah Mujahid, menyatakan bahwa kebijakan tersebut didasarkan pada prinsip syariah dan budaya Afghanistan, meskipun implementasinya menuai kritik luas dari komunitas internasional (Al Jazeera 2022).

Dalam situasi tersebut, berbagai NGO tetap berupaya untuk memberikan dukungan kepada perempuan Afghanistan. Organisasi seperti Women for Afghan Women (WAW), Afghan Women's Network (AWN), dan Medica Afghanistan memainkan peran penting dalam menyediakan layanan perlindungan, bantuan hukum, serta dukungan psikososial bagi perempuan yang menjadi korban diskriminasi dan kekerasan. Namun, operasional organisasi-organisasi tersebut menghadapi berbagai tantangan akibat pembatasan yang diterapkan oleh Taliban, termasuk larangan bagi perempuan untuk bekerja di NGO pada tahun 2022 yang secara langsung mempengaruhi efektivitas program bantuan kemanusiaan

(Reuters 2022). Kondisi ini menciptakan dinamika interaksi yang kompleks antara Taliban sebagai pemerintah de facto dan NGO sebagai aktor non-negara. Di satu sisi, NGO berupaya mempertahankan nilai-nilai hak asasi manusia dan kesetaraan gender, sementara di sisi lain Taliban berusaha mempertahankan kontrol ideologis dan sosial berdasarkan interpretasi mereka terhadap hukum Islam. Perbedaan ini menciptakan ketegangan yang mempengaruhi pola interaksi antara kedua aktor tersebut.

Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola interaksi antara Taliban dan NGO dalam merespons diskriminasi terhadap perempuan di Afghanistan pada periode 2021–2025 dengan menggunakan kerangka teori interaksi NGO-negara yang dikembangkan oleh Stroup. Analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika hubungan antara negara dan NGO dalam konteks rezim otoriter serta implikasinya terhadap perlindungan hak perempuan.

Penelitian ini penting dilakukan karena kembalinya Taliban ke tampuk kekuasaan pada tahun 2021 tidak hanya meningkatkan berbagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan Afghanistan, tetapi juga mengubah hubungan antara pemerintah de facto Afghanistan dan NGO yang selama ini berperan dalam perlindungan, pemberdayaan, serta pemenuhan hak-hak perempuan. Berbagai kebijakan Taliban yang membatasi akses perempuan terhadap pendidikan, pekerjaan, partisipasi politik, dan ruang publik turut memengaruhi kemampuan NGO dalam menjalankan program-program mereka. Di sisi lain, NGO tetap berupaya mempertahankan layanan dan advokasi bagi perempuan meskipun

menghadapi berbagai pembatasan. Kondisi tersebut menciptakan dinamika interaksi yang kompleks antara Taliban dan NGO yang belum banyak dianalisis secara mendalam dalam penelitian sebelumnya.

Sebagian besar penelitian terdahulu lebih berfokus pada dampak kebijakan Taliban terhadap perempuan Afghanistan atau peran NGO dalam memberikan bantuan kemanusiaan. Namun, masih terdapat keterbatasan penelitian yang secara khusus membahas bagaimana pola interaksi yang terbentuk antara Taliban dan NGO dalam merespons isu diskriminasi terhadap perempuan serta faktor-faktor yang memengaruhi munculnya pola interaksi tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk memberikan pemahaman mengenai hubungan antara negara dan NGO dalam konteks rezim yang restriktif dengan menggunakan kerangka NGO Interactions with States yang dikembangkan oleh Sarah S. Stroup.

Dalam penelitian ini, analisis difokuskan pada Women for Afghan Women (WAW), Afghan Women's Network (AWN), dan Medica Afghanistan. Pemilihan ketiga NGO tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa masing-masing organisasi memiliki fokus dan karakteristik yang berbeda dalam merespons isu diskriminasi terhadap perempuan Afghanistan. Women for Afghan Women berfokus pada perlindungan dan layanan langsung bagi perempuan korban kekerasan dan diskriminasi, Afghan Women's Network berfokus pada advokasi hak-hak perempuan dan penguatan jaringan organisasi perempuan, sedangkan Medica Afghanistan berfokus pada layanan kesehatan mental dan dukungan psikososial bagi perempuan. Pemilihan ketiga NGO tersebut menjadi penting karena memungkinkan penelitian untuk menganalisis variasi pola interaksi yang

muncul pada organisasi dengan karakteristik yang berbeda meskipun menghadapi isu yang sama. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjelaskan pola interaksi Taliban dengan NGO secara umum, tetapi juga menunjukkan bagaimana karakteristik NGO dapat memengaruhi bentuk interaksi yang terbentuk.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana pola interaksi antara Taliban dengan NGO yang merespons isu kesetaraan gender di Afghanistan tahun 2021-2025?

1.3 Tujuan Penelitian

Riset ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi isu diskriminasi terhadap perempuan Afghanistan di bawah Taliban tahun 2021-2025.
2. Untuk menganalisis respons Taliban terhadap peran NGO dalam merespons isu diskriminasi terhadap perempuan di konflik Afghanistan di bawah kepemimpinan Taliban 2021-2025.

1.4 Cakupan penelitian

Penelitian ini berfokus pada analisis interaksi Taliban terhadap peran NGO dalam merespons isu diskriminasi perempuan di Afghanistan sejak tahun 2021 hingga 2025. Tahun 2021 dipilih sebagai titik awal karena pada Agustus 2021 terjadi pengambilalihan kekuasaan oleh Taliban. Sementara itu, cakupan tahun 2025 dipilih karena dinamika hubungan Taliban-NGO masih terus berkembang hingga periode ini. Penelitian ini memfokuskan analisis pada tiga

NGO yang bergerak dalam isu perempuan di Afghanistan, yaitu Women for Afghan Women (WAW), Afghan Women's Network (AWN), dan Medica Afghanistan. Pemilihan ketiga organisasi tersebut dilakukan secara purposive berdasarkan beberapa pertimbangan. Pertama, ketiganya memiliki fokus utama pada perlindungan, pemberdayaan, dan pemenuhan hak perempuan Afghanistan sehingga relevan dengan isu diskriminasi gender yang menjadi fokus penelitian. Kedua, ketiga organisasi tetap menunjukkan aktivitas dan respons terhadap berbagai kebijakan Taliban pada periode 2021–2025 sehingga memungkinkan analisis mengenai pola interaksi yang terjadi antara NGO dan pemerintah de facto Afghanistan. Ketiga, masing-masing organisasi merepresentasikan karakteristik NGO yang berbeda. Women for Afghan Women berfokus pada penyediaan layanan perlindungan dan bantuan langsung bagi perempuan, Afghan Women's Network berorientasi pada advokasi dan penguatan jaringan gerakan perempuan, sedangkan Medica Afghanistan berfokus pada layanan kesehatan mental dan dukungan psikososial bagi perempuan. Variasi karakteristik tersebut penting karena penelitian ini menggunakan kerangka NGO Interactions with States dari Sarah S. Stroup yang menempatkan NGO characteristics sebagai salah satu faktor yang memengaruhi pola interaksi antara negara dan NGO. Dengan demikian, pemilihan ketiga NGO ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai bagaimana perbedaan karakteristik organisasi memengaruhi pola interaksi dengan Taliban dalam merespons isu diskriminasi terhadap perempuan Afghanistan.

1.5 Tinjauan Pustaka

Terdapat beberapa penelitian yang membahas mengenai isu diskriminasi perempuan di bawah kepemimpinan Taliban. Diantaranya, pertama, jurnal berjudul *“Legal Protection of Women’s Rights in Afghanistan During Taliban Regime of 2021-2022 and the State responsibility”* yang ditulis oleh Alya Ananda Safitri. Jurnal ini membahas mengenai diskriminasi gender di Afghanistan selama rezim Taliban pada tahun 2021 hingga 2022, yang mana hal ini bertentangan dengan *The Covention on the Elimination of All Forms of Discrimination Againts Women* (CEDAW), yang mana Afghanistan telah meratifikasi CEDAW pada tahun 2003. Dengan ratifikasi ini Afghanistan memiliki tanggung jawab penuh secara hukum untuk mematuhi konsensi ini. Namun, undang-undang *Elimination of Violence againts Women* (EVAW) sama sekali tidak diberlakukan semenjak Taliban berkuasa (Safitri 2024).

Kedua, jurnal berjudul *“The Taliban and women’s human rights in Afghanistan: the way forward”* yang ditulis oleh Sebghatullah Qazi Zada dan Mohd Ziaolhaq Qazi Zada. Jurnal ini membahas mengenai diskriminasi gender yang meluas di Afghanistan, terutama di bawah pemerintahan Taliban dari 1996-2001 dan setelah kebangkitan Taliban pada tahun 2021. Kembalinya Taliban untuk menguasai Afghanistan membuka luka lama bagi perempuan Afghanistan. Kebijakan-kebijakan diskriminatif pada pemerintahan Taliban pada tahun 1996-2001 seperti pembatasan Pendidikan untuk perempuan, penolakan akses Kesehatan untuk perempuan, dirampasnya kebebasan perempuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan publik, hingga memberlakukan hukuman seperti cambuk, rajam dan eksekusi untuk perempuan yang melanggar. Hal ini

menciptakan kontradiksi langsung dengan kewajiban Afghanistan berdasarkan perjanjian hak asasi manusia internasional seperti CEDAW. Praktik diskriminatif ini telah menyebabkan dan menciptakan sistem 'apartheid gender' (Qazi Zada & Qazi Zada 2024).

Ketiga, jurnal yang berjudul "*The Role of UN Women in Addressing Women's Rights in Afghanistan under Taliban*" yang ditulis oleh Nur Azizah dan Fahriyya Noor Ahsana. Penelitian ini membahas peran UN Women dalam mengatasi masalah hak-hak perempuan di Afghanistan di bawah pemerintahan Taliban. Sejak Taliban mengambil alih pada tahun 2021, perempuan dan anak perempuan di Afghanistan menghadapi pembatasan signifikan dalam pendidikan, pekerjaan, dan kebebasan bergerak. UN Women, yang beroperasi di Afghanistan sejak 2002 dan resmi pada 2010, berperan sebagai forum dengan memfasilitasi delegasi perempuan Afghanistan berbicara di forum internasional, seperti Debat Terbuka Dewan Keamanan PBB. Mereka juga bertindak sebagai donor melalui UN Trust Fund to End Violence Against Women, menyediakan bantuan keuangan untuk program pencegahan kekerasan dan akses layanan. Selain itu, UN Women berfungsi sebagai advokat, menyuarakan hak-hak perempuan kepada komunitas internasional dan mengadakan pertemuan dengan Taliban untuk menuntut perubahan kebijakan yang merugikan. Advokasi ini telah menghasilkan beberapa tanggapan, seperti pengecualian pekerja kesehatan perempuan dari larangan bekerja (Azizah & Ahsana 2023).

Jurnal berjudul "*Silenced voices, enduring struggles: An Islamic feminist analysis of Afghan female academics under Taliban rule*" yang ditulis oleh Shahira Shahir, Xiaoni Ren, dan Shaista Noor. Jurnal ini membahas mengenai

dampak sistematis kebijakan Taliban terhadap perempuan Afghanistan sejak 2021. Penelitian ini mengungkapkan bahwa Taliban memberlakukan larangan bagi perempuan untuk bekerja di organisasi bantuan lokal dan asing, yang mengakibatkan beberapa NGO menanggukkan operasi mereka. Kebijakan ini menciptakan eksklusi ekonomi yang massif, di mana 77% kelompok yang dipimpin perempuan kehilangan pendanaan dan 85% rumah tangga yang dipimpin perempuan terpaksa menggunakan strategi bertahan negatif. Melalui wawancara mendalam dengan 12 akademisi perempuan Afghanistan, jurnal ini menunjukkan bahwa pembatasan pekerjaan di NGO dan UN tidak hanya menyebabkan kehilangan pendapatan, tetapi juga menghilangkan identitas profesional dan otonomi perempuan, menciptakan ketergantungan ekonomi yang memperkuat kontrol patriarkal Taliban.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa kajian mengenai Afghanistan pasca kembalinya Taliban pada tahun 2021 umumnya berfokus pada dua aspek utama. Pertama, penelitian yang membahas berbagai bentuk diskriminasi dan pembatasan hak-hak perempuan yang diterapkan oleh Taliban. Kedua, penelitian yang menjelaskan peran NGO dalam memberikan bantuan kemanusiaan, perlindungan, maupun pemberdayaan bagi perempuan Afghanistan. Selain itu, terdapat pula penelitian yang membahas hubungan Taliban dengan aktor internasional dalam konteks bantuan kemanusiaan dan tata kelola pascakonflik. Namun, penelitian-penelitian tersebut cenderung membahas Taliban dan NGO sebagai dua entitas yang terpisah sehingga belum menjelaskan secara mendalam bagaimana pola interaksi yang terbentuk di antara keduanya dalam merespons isu diskriminasi terhadap perempuan Afghanistan.

Selain itu, penelitian terdahulu umumnya lebih menekankan pada dampak kebijakan Taliban atau efektivitas program NGO, sementara analisis mengenai faktor-faktor yang membentuk pola interaksi antara negara dan NGO masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis pola interaksi antara Taliban dan NGO menggunakan kerangka NGO Interactions with States dari Sarah S. Stroup. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi pola interaksi yang muncul, tetapi juga menjelaskan bagaimana issue area, state characteristics, dan NGO characteristics memengaruhi terbentuknya pola interaksi antara Taliban dan NGO dalam merespons isu diskriminasi terhadap perempuan Afghanistan pada periode 2021–2025.

1.6 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini akan menggunakan teori *NGO's Interactions With States* oleh Sarah S. Stroups dalam buku Routledge Handbook of NGO and International Relations. Menurut buku tersebut Dalam konteks hubungan internasional kontemporer, interaksi antara negara dan *Non-Governmental Organizations* (NGO) telah menjadi aspek penting dalam politik global. Hubungan NGO-negara dapat dikategorikan ke dalam empat pola interaksi utama berdasarkan kesamaan atau perbedaan dalam tujuan (*ends*) dan strategi (*means*) antara *conflict*, *cooperation*, *competition*, dan *cooptation*.

Pola pertama adalah *conflict*, yang terjadi ketika NGO dan negara memiliki perbedaan baik dalam tujuan maupun strategi (Stroups 2019, 33). Kondisi ini menghasilkan hubungan yang konfrontatif karena kedua aktor tidak memiliki kesamaan baik dalam orientasi maupun cara bertindak. Dalam literatur

yang dibahas Stroup, pola konflik banyak ditemukan pada NGO advokasi yang menentang kebijakan negara dan berupaya memberikan tekanan melalui kritik publik, kampanye internasional, maupun mekanisme akuntabilitas global. Menurut Stroup, konflik umumnya muncul ketika NGO dan negara berbeda pandangan mengenai tujuan yang hendak dicapai atau ketika NGO menilai negara bertindak tidak sesuai dengan komitmen hukum maupun norma yang telah diakui negara tersebut.

Pola kedua adalah *cooperation*, yang terjadi ketika kedua pihak berbagi tujuan dan strategi yang sama. Dalam kondisi ini, kedua aktor dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama melalui mekanisme dan pendekatan yang serupa. Stroup menjelaskan bahwa hubungan kooperatif sering ditemukan dalam sektor pembangunan dan pelayanan publik karena NGO sering dipandang memiliki kapasitas untuk membantu negara dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Kerja sama juga dapat terjadi ketika negara memiliki komitmen terhadap suatu tujuan, tetapi mengalami keterbatasan kapasitas dalam mewujudkannya. Dalam situasi tersebut, NGO berperan sebagai mitra yang membantu negara mencapai target kebijakan tertentu (Stroups 2019, 34).

Pola ketiga adalah *competition*, di mana NGO dan negara memiliki tujuan sama tetapi strategi berbeda. Stroup menegaskan bahwa hubungan NGO dan negara tidak selalu bersifat saling melengkapi, melainkan sering kali melibatkan persaingan dalam memengaruhi masyarakat, menyediakan layanan, membentuk regulasi, maupun memperoleh legitimasi. Persaingan dapat muncul ketika NGO dan negara menawarkan solusi yang berbeda terhadap suatu masalah atau ketika keduanya berusaha menjadi sumber otoritas yang dianggap paling sah oleh

masyarakat dan aktor internasional. Oleh karena itu, kompetisi tidak selalu menunjukkan permusuhan, tetapi menunjukkan adanya perbedaan pendekatan dalam mencapai tujuan yang relatif sama (Stroups 2019, 35).

Pola keempat adalah *cooptation*, yang terjadi ketika sumber daya satu aktor melayani tujuan aktor lain. Dalam hubungan ini, NGO maupun negara dapat memanfaatkan kapasitas, legitimasi, jaringan, atau sumber daya pihak lain guna mencapai kepentingannya masing-masing. Stroup menjelaskan bahwa kooptasi sering dipahami sebagai upaya negara memanfaatkan NGO untuk memperkuat legitimasi atau melaksanakan fungsi tertentu. Namun, dalam kondisi tertentu NGO juga dapat memengaruhi penggunaan sumber daya negara sehingga negara bertindak sesuai dengan agenda yang didorong oleh NGO. Dengan demikian, kooptasi merupakan hubungan yang menunjukkan adanya ketergantungan dan pemanfaatan sumber daya antaraktor (Stroups 2019, 35).

Terdapat 4 faktor utama yang membentuk pola interaksi NGO dan negara. Pertama yaitu *issue area*, *issue area* sangat mempengaruhi pola hubungan. Bidang isu yang ditangani NGO memengaruhi bentuk hubungan yang berkembang dengan negara. Setiap isu memiliki karakteristik politik dan kelembagaan yang berbeda sehingga dapat menghasilkan pola interaksi yang berbeda pula. Stroup menunjukkan bahwa beberapa isu lebih sering menghasilkan kerja sama, sementara isu lain lebih rentan menghasilkan konflik atau kompetisi. Selain itu, pola hubungan NGO dan negara dapat berubah seiring perkembangan suatu isu dari waktu ke waktu (Stroups 2019, 36).

Kedua *NGO characteristics*, Stroup mengidentifikasi tiga aspek penting yang memengaruhi strategi NGO dalam berinteraksi dengan negara, yaitu

komitmen normatif (*principled commitments*), otoritas atau status (*authority*), dan pengaruh dari sesama NGO (*peer influence*). Komitmen normatif berkaitan dengan nilai-nilai yang dianut organisasi dan sejauh mana nilai tersebut memengaruhi hubungan NGO dengan negara. Otoritas atau status menunjukkan tingkat pengakuan dan legitimasi yang dimiliki NGO dalam lingkungan politik maupun internasional. Sementara itu, pengaruh sesama NGO mengacu pada proses pembelajaran, imitasi, maupun tekanan dari organisasi lain yang berada dalam jaringan yang sama. Perbedaan karakteristik tersebut menyebabkan NGO dapat memilih strategi yang berbeda meskipun bergerak dalam isu yang serupa (Stroups 2019, 37).

Ketiga *state characteristics*, Menurut Stroup, hubungan NGO dan negara dipengaruhi oleh tingkat pembangunan, tipe rezim, serta struktur regulasi domestik yang berlaku di suatu negara. Tingkat pembangunan menentukan kebutuhan dan peran NGO dalam suatu negara, sedangkan tipe rezim memengaruhi tingkat keterbukaan negara terhadap partisipasi masyarakat sipil. Negara demokratis umumnya memberikan ruang yang lebih luas bagi aktivitas NGO dibandingkan negara otoriter. Selain itu, struktur regulasi domestik, seperti aturan mengenai registrasi, pendanaan, dan aktivitas NGO, turut membentuk cara NGO berinteraksi dengan negara. Oleh karena itu, karakteristik negara menjadi faktor penting dalam menentukan peluang maupun hambatan yang dihadapi NGO (Stroups 2019, 37).

Keempat *resource flows*, sumber pendanaan dan dukungan sumber daya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hubungan NGO dan negara.

Ketergantungan NGO terhadap pendanaan pemerintah atau donor tertentu dapat memengaruhi strategi dan perilaku organisasi. Dalam beberapa kasus, kebutuhan untuk mempertahankan akses terhadap sumber daya mendorong NGO untuk menyesuaikan program maupun pendekatannya agar sesuai dengan preferensi pihak pemberi dana. Namun demikian, banyak NGO berupaya menjaga independensinya dengan melakukan diversifikasi sumber pendanaan. Oleh karena itu, pola aliran sumber daya menjadi faktor yang dapat memperkuat kerja sama, menciptakan ketergantungan, ataupun memunculkan potensi kooptasi dalam hubungan NGO dan negara (Stroups 2019, 38).

1.7 Argumen Sementara

Interaksi antara Taliban dan NGO dalam merespons diskriminasi terhadap perempuan di Afghanistan tahun 2021–2025 menunjukkan pola *conflict*, *cooperation*, *competition*, dan *cooptation*. Pola *conflict* muncul karena Taliban menerapkan berbagai kebijakan diskriminatif terhadap perempuan seperti pembatasan pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi perempuan di ruang publik, sementara NGO perempuan berupaya memperjuangkan perlindungan hak perempuan dan kesetaraan gender. Sementara itu, pola *cooperation* terjadi secara terbatas dalam sektor kemanusiaan dan kesehatan karena Taliban tetap membutuhkan bantuan NGO untuk membantu masyarakat Afghanistan di tengah krisis ekonomi dan kemanusiaan. Pola *cooptation* terlihat dari persaingan legitimasi antara Taliban dan NGO terkait isu perempuan, di mana Taliban menggunakan narasi agama dan budaya Afghanistan sedangkan NGO menggunakan pendekatan hak asasi manusia dan kesetaraan gender. Selain itu, pola *cooptation* muncul ketika Taliban tetap memberikan ruang operasional

terbatas bagi NGO, namun aktivitas organisasi harus mengikuti regulasi dan pengawasan pemerintah de facto Afghanistan. Sedangkan pola *competition* tidak muncul dominan dikarenakan pola *competition* butuh tujuan yang sama tapi strategi berbeda. Taliban dan NGO perempuan punya tujuan yang berbeda secara fundamental dimana Taliban ingin batasi perempuan, NGO ingin melindungi hak perempuan (Stroup 2019, 33-35).

Keempat pola interaksi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor pembentuk (*shaping factors*). Dalam *issue area*, isu diskriminasi terhadap perempuan menjadi isu yang sangat sensitif bagi Taliban karena berkaitan langsung dengan legitimasi ideologis dan interpretasi syariah yang menjadi dasar pemerintahan mereka. Dalam *NGO characteristics*, NGO yang berfokus pada advokasi hak perempuan seperti Afghan Women's Network cenderung menghadapi konflik yang lebih besar dibandingkan NGO yang lebih berorientasi pada layanan kemanusiaan seperti Medica Afghanistan. Dalam *state characteristics*, Taliban sebagai rezim *authoritarian-theocratic* memiliki kecenderungan untuk mengontrol organisasi masyarakat sipil dan membatasi NGO yang dianggap mengancam legitimasi negara. Sementara itu, dalam *resource flows*, ketergantungan Afghanistan terhadap bantuan internasional menyebabkan Taliban tetap membutuhkan NGO dalam distribusi bantuan kemanusiaan dan layanan sosial bagi masyarakat Afghanistan (Stroup 2019, 36-38).

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif digunakan untuk memahami dan menggambarkan suatu fenomena sosial secara mendalam berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis. Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk menganalisis pola interaksi antara Taliban dan NGO dalam merespons isu diskriminasi terhadap perempuan di Afghanistan pada periode 2021–2025.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah Taliban dan NGO yang merespons isu diskriminasi terhadap perempuan di Afghanistan pada tahun 2021-2025.

Sedangkan objek penelitian ini adalah interaksi Taliban terhadap dan NGO dalam merespons isu diskriminasi terhadap perempuan di Afghanistan Pada tahun 2021-2025.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Selama proses analisis data, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan, khususnya menggunakan strategi pengumpulan data sekunder seperti dokumen resmi dan data yang tersedia untuk umum dari sumber-sumber online. Selanjutnya, data yang diperoleh diperiksa secara menyeluruh untuk mengekstrak informasi yang relevan dan dapat diterapkan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang ada.

1.8.4 Proses Penelitian

Penelitian ini mengumpulkan data dokumentasi dari media digital seperti jurnal, buku, laporan, dan situs web resmi. Prosesnya melalui tiga tahap: penelitian pendahuluan dengan mengkaji referensi relevan secara komprehensif, pengumpulan data berdasarkan ketepatan dan posisi penerbit terkait subjek, serta pemeriksaan data untuk meneliti kembali seluruh materi yang telah diperoleh.

1.9 Sistematika Pembahasan

Pembahasan penelitian ini akan dijabarkan dalam 4 bab yang berisikan;

Bab 1: Bab pertama ini akan memberikan gambaran umum tentang masalah atau isu yang dihadapi, termasuk latar belakang dan perumusan masalahnya. Bab ini juga akan menguraikan tujuan penelitian dan cakupannya. Selain itu, bab ini juga akan membahas tinjauan pustaka yang digunakan untuk menganalisis masalah, kerangka teori yang digunakan, serta metode dan prosedur penelitian yang digunakan.

Bab 2: Bab kedua ini akan menjelaskan mengenai kepemimpinan Taliban. gambaran pelanggaran hak-hak asasi pada perempuan di konflik Afganistan di bawah kepemimpinan taliban dengan cakupan tahun 2021 hingga 2025, Kemunculan dan Peran NGO Lokal dan Internasional.

Bab 3: Bab ini akan menjelaskan hasil penelitian sekaligus memberikan analisis serta menjawab rumusan masalah terkait topik pada penelitian ini.

Bab 4: Pada bab terakhir ini penulis akan memberi kesimpulan mengenai penelitian yang sudah dilakukan dan akan memberikan saran untuk peneliti selanjutnya.

BAB 2

Isu Diskriminasi Terhadap Perempuan Afghanistan Di Bawah

Kepemimpinan Taliban Tahun 2021-2025

Bab ini membahas landasan konseptual dan teoritis yang digunakan untuk menganalisis interaksi antara Taliban dan Non-Governmental Organizations (NGO) dalam merespons diskriminasi terhadap perempuan di Afghanistan periode 2021–2025. Pembahasan diawali dengan uraian mengenai konsep NGO dan perannya dalam hubungan internasional, kemudian dilanjutkan dengan penjelasan mengenai teori interaksi NGO dan negara yang dikemukakan oleh Sarah S. Stroup sebagai kerangka analisis utama dalam penelitian ini. Selain itu, bab ini juga menguraikan kondisi diskriminasi terhadap perempuan di Afghanistan di bawah kepemimpinan Taliban serta meninjau penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Melalui pembahasan tersebut, bab ini bertujuan membangun landasan teoritis dan konseptual yang menjadi dasar untuk menganalisis pola interaksi antara Taliban dan NGO dalam merespons isu diskriminasi terhadap perempuan di Afghanistan.

2.1. Kepemimpinan Taliban Di Afghanistan

Taliban pertama kali muncul pada pertengahan 1990-an di Afghanistan selatan, khususnya di wilayah Kandahar, sebagai gerakan yang terdiri dari para santri (*talib*) yang dipimpin oleh Mullah Mohammad Omar. Kemunculan Taliban tidak dapat dipisahkan dari kondisi instabilitas politik pasca runtuhnya rezim komunis dan perang saudara antar faksi mujahidin yang menyebabkan kekacauan keamanan di Afghanistan. Dalam konteks tersebut, Taliban menawarkan stabilitas

melalui penerapan hukum Islam yang ketat, yang kemudian menarik dukungan dari sebagian masyarakat (Rashid 2000, 27).

Pada tahun 1996, Taliban berhasil menguasai Kabul dan mendirikan Emirat Islam Afghanistan. Selama periode kekuasaan 1996–2001, Taliban menerapkan kebijakan yang sangat membatasi hak perempuan, termasuk pelarangan pendidikan bagi perempuan, larangan bekerja di sektor publik, serta pembatasan mobilitas yang mewajibkan perempuan didampingi oleh mahram dalam aktivitas di ruang publik (Human Rights Watch 2001, 15). Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa sejak awal, ideologi Taliban telah menempatkan perempuan dalam posisi subordinat dalam struktur sosial.

Kebijakan diskriminatif terhadap perempuan pada periode tersebut bukan hanya bersifat sosial, tetapi juga dilembagakan melalui sistem pemerintahan yang berbasis interpretasi konservatif terhadap syariah. Taliban membentuk institusi seperti Kementerian Promosi Kebajikan dan Pencegahan Kemungkaran yang bertugas mengawasi kepatuhan masyarakat terhadap norma yang ditetapkan, termasuk aturan yang secara khusus membatasi perempuan (Giustozzi 2019, 112). Struktur ini menunjukkan bahwa kontrol terhadap perempuan merupakan bagian integral dari sistem pemerintahan Taliban.

Setelah jatuhnya rezim Taliban pada tahun 2001 akibat intervensi militer Amerika Serikat, Afghanistan memasuki periode rekonstruksi yang ditandai dengan peningkatan akses perempuan terhadap pendidikan dan pekerjaan. Selama dua dekade berikutnya, perempuan Afghanistan memperoleh ruang yang lebih luas dalam kehidupan sosial dan politik, termasuk partisipasi dalam pemerintahan

dan sektor pendidikan (World Bank 2020, 14). Namun, kemajuan tersebut tidak sepenuhnya menghilangkan struktur patriarkal yang telah lama mengakar dalam masyarakat Afghanistan.

Pada Agustus 2021, Taliban kembali mengambil alih kekuasaan setelah penarikan pasukan internasional. Kembalinya Taliban menandai perubahan signifikan dalam struktur politik Afghanistan, dengan pembentukan pemerintahan *de facto* yang didominasi oleh elite Taliban. Kepemimpinan Taliban saat ini berada di bawah Amir Haibatullah Akhundzada sebagai pemimpin tertinggi, dengan tokoh-tokoh seperti Abdul Ghani Baradar dan Sirajuddin Haqqani memegang posisi strategis dalam pemerintahan (International Crisis Group 2022, 4).

Struktur pemerintahan Taliban pasca 2021 menunjukkan karakteristik yang sangat terpusat dan didominasi oleh laki-laki. Tidak terdapat perempuan dalam kabinet maupun posisi pemerintahan tingkat tinggi, yang menunjukkan eksklusi sistematis terhadap perempuan dari ruang politik (Human Rights Watch 2023, 6). Kondisi ini memperkuat posisi perempuan sebagai kelompok yang tidak memiliki representasi dalam proses pengambilan kebijakan.

Selain itu, kebijakan pemerintah Taliban sering kali diputuskan oleh lingkaran elite yang berbasis di Kandahar, tanpa melalui proses konsultasi yang luas dengan masyarakat sipil. Hal ini menyebabkan ruang partisipasi publik menjadi sangat terbatas, termasuk bagi organisasi masyarakat sipil yang berfokus pada isu perempuan (Jackson 2023, 9). Dengan demikian, karakteristik

kepemimpinan Taliban memiliki dampak langsung terhadap kebijakan diskriminatif yang diterapkan terhadap perempuan di Afghanistan.

2.2. Isu Diskriminasi terhadap Perempuan Afghanistan di Bawah Kepemimpinan Taliban 2021-2025

Kembalinya Taliban ke tampuk kekuasaan pada Agustus 2021 membawa perubahan besar terhadap kondisi sosial dan politik Afghanistan, khususnya bagi perempuan. Setelah dua dekade mengalami peningkatan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi politik, perempuan Afghanistan kembali menghadapi berbagai pembatasan yang diterapkan oleh pemerintah *de facto* Taliban. Berbagai organisasi internasional maupun media lokal Afghanistan mencatat bahwa perubahan tersebut terjadi secara cepat dan sistematis dalam hampir seluruh aspek kehidupan sosial. (TOLO News, 2021). Diskriminasi terhadap perempuan di Afghanistan tidak hanya terlihat dalam satu sektor tertentu, tetapi mencakup pendidikan, pekerjaan, politik, kesehatan, hingga kehidupan sehari-hari. Berbagai kebijakan yang diterapkan Taliban menciptakan sistem eksklusi sosial yang secara efektif mengeluarkan perempuan dari ruang publik. (Amnesty International 2023, 11).

Kondisi diskriminatif yang dialami perempuan Afghanistan kemudian mendorong banyak pengamat internasional untuk menyebut situasi tersebut sebagai bentuk “*gender apartheid*.” Istilah ini digunakan untuk menggambarkan sistem diskriminasi yang secara sistematis mengecualikan perempuan dari hampir seluruh aspek kehidupan publik. UN Women menyatakan bahwa Afghanistan menjadi satu-satunya negara di dunia di mana perempuan dilarang mengakses

pendidikan menengah dan tinggi secara menyeluruh (UN Women 2023, 6). Dengan demikian, diskriminasi terhadap perempuan di Afghanistan tidak lagi dipahami sebagai pembatasan individual semata, tetapi sebagai sistem sosial-politik yang secara aktif memproduksi ketidaksetaraan gender dalam masyarakat.

Setelah Taliban kembali berkuasa di Afghanistan pada tahun 2021, perempuan mengalami berbagai bentuk diskriminasi, terutama dalam bidang pendidikan dan politik. Salah satu kebijakan yang paling menonjol adalah pembatasan akses pendidikan bagi perempuan. Pada September 2021, Taliban mengumumkan bahwa sekolah menengah untuk anak perempuan tidak dibuka kembali di sebagian besar wilayah Afghanistan. Kebijakan ini menyebabkan jutaan anak perempuan kehilangan akses untuk melanjutkan pendidikan setelah tingkat dasar. (UNESCO 2023, 5).

Taliban menyatakan bahwa penutupan tersebut hanya bersifat sementara untuk menyesuaikan sistem pendidikan dengan prinsip syariah. Namun, hingga beberapa tahun kemudian, sebagian besar sekolah menengah perempuan masih tetap ditutup. Banyak siswa perempuan yang telah bersiap kembali ke sekolah akhirnya dipulangkan secara mendadak setelah adanya instruksi baru dari otoritas Taliban. Situasi ini menimbulkan ketidakpastian dan berdampak pada kondisi psikologis perempuan muda di Afghanistan. (TOLO News 2022).

Pembatasan tersebut semakin meluas pada Desember 2022 ketika Taliban melarang perempuan menempuh pendidikan di universitas. Kebijakan ini mendapat kritik luas dari komunitas internasional karena dianggap melanggar hak

pendidikan perempuan. Banyak mahasiswi terpaksa menghentikan studi mereka secara tiba-tiba, sementara sejumlah universitas kehilangan sebagian besar mahasiswa perempuan dan menutup ruang kelas khusus perempuan. (UNESCO 2023, 6).

Larangan pendidikan tinggi ini tidak hanya berdampak pada hak individu, tetapi juga terhadap pembangunan jangka panjang Afghanistan. Pendidikan tinggi sebelumnya menjadi salah satu sarana utama bagi perempuan untuk memperoleh pekerjaan profesional dan meningkatkan posisi sosial mereka. Tanpa akses pendidikan, perempuan akan semakin sulit memasuki sektor seperti kesehatan, pendidikan, hukum, dan administrasi publik. Selain itu, pembatasan pendidikan juga dipandang sebagai kemunduran terhadap perubahan sosial yang telah berkembang selama dua dekade sebelum Taliban kembali berkuasa. (World Bank 2020, 15).

Diskriminasi terhadap perempuan juga terjadi dalam bidang politik. Taliban tidak melibatkan perempuan dalam kabinet maupun struktur pemerintahan tingkat tinggi, sehingga perempuan tidak memiliki representasi dalam proses pengambilan keputusan politik (Human Rights Watch 2023, 6). Selain itu, organisasi perempuan dan aktivis masyarakat sipil menghadapi berbagai hambatan setelah Taliban berkuasa. Banyak aktivis perempuan mengalami intimidasi, ancaman, bahkan penahanan ketika melakukan demonstrasi atau menyuarakan kritik terhadap kebijakan Taliban. (Pajhwok Afghan News 2022).

Setelah Taliban kembali berkuasa pada tahun 2021, perempuan Afghanistan mengalami berbagai bentuk diskriminasi dalam kehidupan

sehari-hari. Kebijakan yang diterapkan Taliban tidak hanya membatasi akses perempuan terhadap pendidikan dan pekerjaan, tetapi juga mempengaruhi mobilitas, aktivitas sosial, serta akses terhadap layanan publik. Pembatasan tersebut dilakukan melalui regulasi resmi negara dan diperkuat dengan pengawasan sosial yang ketat di ruang publik. Akibatnya, ruang gerak perempuan menjadi semakin sempit dibandingkan periode sebelum Taliban kembali memegang kekuasaan. Banyak perempuan kehilangan kebebasan dasar dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dan menjadi semakin terisolasi dari kehidupan sosial. (Amnesty International 2023, 13).

Salah satu bentuk pembatasan yang paling nyata adalah aturan mengenai mobilitas perempuan di ruang publik. Taliban menerapkan kebijakan yang mewajibkan perempuan untuk didampingi oleh mahram atau anggota keluarga laki-laki ketika melakukan perjalanan jarak jauh. Kebijakan tersebut diumumkan secara resmi oleh Kementerian Promosi Kebajikan dan Pencegahan Kemungkaran dan kemudian diterapkan di berbagai wilayah Afghanistan. Dalam praktiknya, aturan tersebut membuat banyak perempuan mengalami kesulitan untuk bekerja, bersekolah, atau mengakses layanan kesehatan tanpa kehadiran pendamping laki-laki. Beberapa laporan media lokal menunjukkan bahwa perempuan bahkan mengalami kesulitan menggunakan transportasi umum apabila tidak memenuhi syarat yang ditetapkan oleh otoritas Taliban (TOLO News 2023).

Pembatasan mobilitas tersebut berdampak signifikan terhadap kehidupan sosial perempuan Afghanistan. Banyak perempuan menjadi semakin bergantung pada anggota keluarga laki-laki untuk melakukan aktivitas dasar di luar rumah.

Dalam konteks keluarga miskin atau rumah tangga yang dipimpin perempuan, aturan mahram menciptakan hambatan tambahan karena tidak semua perempuan memiliki anggota keluarga laki-laki yang dapat mendampingi mereka (Pajhwok Afghan News 2023). Hal ini menunjukkan bahwa pembatasan mobilitas tidak hanya mempengaruhi kebebasan sosial perempuan, tetapi juga berdampak langsung terhadap kondisi ekonomi mereka.

Selain pembatasan mobilitas, Taliban juga menerapkan aturan berpakaian yang ketat bagi perempuan di ruang publik. Pada tahun 2022, Taliban mewajibkan perempuan mengenakan pakaian yang menutupi seluruh tubuh, termasuk penggunaan cadar di beberapa wilayah. Pemerintah Taliban menyebut kebijakan tersebut sebagai upaya menjaga moralitas dan nilai-nilai Islam. Namun, berbagai organisasi hak asasi manusia menilai bahwa aturan tersebut merupakan bentuk kontrol negara terhadap tubuh dan kebebasan perempuan (Amnesty International 2023, 15).

Diskriminasi juga terjadi dalam sektor ketenagakerjaan dan kesehatan. Banyak perempuan kehilangan pekerjaan di sektor pemerintahan, pendidikan, media, dan NGO setelah Taliban melarang perempuan bekerja di organisasi nasional maupun internasional pada akhir 2022. Kebijakan ini bahkan mempengaruhi distribusi bantuan kemanusiaan karena banyak organisasi bergantung pada staf perempuan untuk menjangkau perempuan dan anak-anak. (Reuters 2022).

Selain berdampak terhadap pekerjaan dan kehidupan sosial, kebijakan Taliban juga memberikan dampak serius terhadap sektor kesehatan perempuan.

Dalam konteks sosial Afghanistan, interaksi antara laki-laki dan perempuan sangat dibatasi oleh norma budaya dan agama. Oleh karena itu, perempuan seringkali hanya dapat menerima layanan kesehatan dari tenaga medis perempuan. Namun, pembatasan terhadap pendidikan perempuan menyebabkan berkurangnya jumlah calon tenaga kesehatan perempuan di masa depan. Kondisi ini menciptakan defisit tenaga kesehatan perempuan yang semakin memperburuk akses perempuan terhadap layanan kesehatan, terutama di wilayah pedesaan (World Health Organization, 2023 12).

2.3 Kemunculan dan Peran NGO lokal dan Internasional

Dalam situasi pembatasan terhadap perempuan yang semakin meningkat setelah Taliban kembali berkuasa pada tahun 2021, organisasi masyarakat sipil memainkan peran penting dalam merespons berbagai bentuk diskriminasi yang dialami oleh perempuan Afghanistan. Organisasi non-pemerintah atau *Non-Governmental Organizations* (NGO) seringkali menjadi aktor utama dalam memberikan dukungan kepada kelompok masyarakat yang mengalami marginalisasi. Dalam konteks Afghanistan, NGO tidak hanya berperan sebagai penyedia layanan kemanusiaan tetapi juga sebagai aktor advokasi yang berupaya memperjuangkan hak-hak perempuan di tingkat nasional maupun internasional. (Kaldor 2013).

Dalam penelitian ini, analisis difokuskan pada tiga organisasi non-pemerintah yang secara khusus berfokus pada isu perlindungan dan pemberdayaan perempuan di Afghanistan, yaitu Women for Afghan Women (WAW), Afghan Women's Network (AWN), dan Medica Afghanistan. Ketiga

organisasi ini dipilih karena memiliki pendekatan yang berbeda dalam merespons diskriminasi terhadap perempuan.

2.3.1 Women For Afghan Women

Women for Afghan Women atau WAW merupakan salah satu organisasi perempuan terbesar yang berfokus pada perlindungan hak perempuan Afghanistan. Organisasi ini didirikan pada tahun 2001 oleh sekelompok perempuan Afghanistan dan diaspora Afghanistan dengan tujuan memberikan perlindungan, bantuan hukum, dan pemberdayaan bagi perempuan yang mengalami kekerasan dan diskriminasi. Sejak awal berdirinya, WAW berupaya membangun ruang aman bagi perempuan Afghanistan melalui berbagai program sosial dan kemanusiaan. Organisasi ini kemudian berkembang menjadi salah satu NGO paling dikenal dalam isu perempuan di Afghanistan. Selain beroperasi di Afghanistan, WAW juga memiliki jaringan internasional yang mendukung advokasi hak perempuan Afghanistan di tingkat global (Women for Afghan Women 2023, 4).

Sebelum Taliban kembali berkuasa pada tahun 2021, WAW mengelola berbagai program yang berfokus pada perlindungan perempuan dan anak perempuan. Program-program tersebut meliputi shelter bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, bantuan hukum, pendidikan, pelatihan keterampilan, serta dukungan psikososial bagi perempuan yang mengalami trauma. Kehadiran shelter menjadi salah satu program utama organisasi ini karena banyak perempuan Afghanistan menghadapi kekerasan domestik dan pernikahan paksa. Dalam konteks masyarakat yang masih patriarkal, shelter yang disediakan WAW menjadi

ruang penting bagi perempuan untuk memperoleh perlindungan dan bantuan (Women for Afghan Women 2023, 7).

Meskipun menghadapi berbagai pembatasan, WAW tetap berupaya mempertahankan layanan bagi perempuan Afghanistan. Organisasi ini menyesuaikan strategi operasional mereka dengan meningkatkan koordinasi dengan komunitas lokal dan memperluas dukungan jarak jauh bagi perempuan yang membutuhkan bantuan. Dalam beberapa kasus, WAW juga bekerja sama dengan jaringan internasional untuk mengadvokasi kondisi perempuan Afghanistan di tingkat global. Hal ini menunjukkan bahwa organisasi tersebut tidak hanya berperan sebagai penyedia layanan kemanusiaan, tetapi juga sebagai aktor advokasi internasional dalam isu hak perempuan Afghanistan (Women for Afghan Women 2023, 10).

Selain memberikan layanan langsung, WAW juga aktif menyuarakan dampak kebijakan Taliban terhadap perempuan Afghanistan melalui berbagai forum internasional. Organisasi ini beberapa kali menyampaikan bahwa pembatasan terhadap perempuan telah memperburuk kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Afghanistan secara keseluruhan. Dalam laporan organisasi tersebut, disebutkan bahwa banyak perempuan kehilangan akses terhadap perlindungan hukum dan dukungan sosial setelah Taliban kembali berkuasa. Kondisi ini meningkatkan risiko kekerasan berbasis gender dan mempersempit ruang aman bagi perempuan Afghanistan (Women for Afghan Women 2023, 12).

2.3.2 Afghan Women's Network

Afghan Women's Network atau AWN merupakan salah satu jaringan organisasi perempuan terbesar di Afghanistan yang berfokus pada advokasi hak perempuan, pemberdayaan sosial, serta peningkatan partisipasi perempuan dalam kehidupan politik dan masyarakat sipil. Organisasi ini didirikan pada tahun 1995 oleh sejumlah aktivis perempuan Afghanistan yang ingin membangun solidaritas antar organisasi perempuan di tengah situasi konflik dan ketidakstabilan politik. Sejak awal berdirinya, AWN tidak hanya berfungsi sebagai organisasi tunggal, tetapi juga sebagai jaringan yang menghubungkan berbagai kelompok perempuan di Afghanistan. Dengan karakteristik tersebut, AWN memiliki peran penting dalam memperkuat gerakan perempuan Afghanistan di tingkat nasional maupun internasional (Afghan Women's Network 2023, 5).

Sebelum Taliban kembali berkuasa pada tahun 2021, AWN aktif dalam berbagai program advokasi yang berkaitan dengan hak perempuan, pendidikan, partisipasi politik, serta perlindungan terhadap kekerasan berbasis gender. Organisasi ini sering bekerja sama dengan pemerintah Afghanistan sebelumnya, organisasi internasional, dan lembaga donor dalam mendorong kebijakan yang mendukung kesetaraan gender. Selain itu, AWN juga aktif dalam pelatihan kepemimpinan perempuan dan penguatan kapasitas organisasi perempuan lokal di berbagai wilayah Afghanistan. Dalam konteks tersebut, AWN menjadi salah satu simbol berkembangnya masyarakat sipil perempuan di Afghanistan pasca 2001 (UN Women 2021, 7).

Kembalinya Taliban ke kekuasaan pada tahun 2021 menciptakan tantangan besar bagi AWN. Sebagai organisasi yang secara terbuka mengadvokasi hak perempuan dan kesetaraan gender, AWN menghadapi tekanan yang lebih besar dibandingkan organisasi yang hanya berfokus pada bantuan kemanusiaan. Taliban memandang sebagian agenda yang dibawa oleh organisasi perempuan sebagai bentuk pengaruh nilai Barat yang dianggap bertentangan dengan interpretasi syariah yang mereka gunakan. Akibatnya, ruang gerak organisasi perempuan menjadi semakin terbatas setelah Taliban kembali berkuasa. Banyak aktivis perempuan yang sebelumnya aktif di ruang publik juga mulai menghadapi ancaman keamanan dan intimidasi (Human Rights Watch 2023, 17). Selain menghadapi tekanan politik, AWN juga mengalami kesulitan dalam menjalankan aktivitas organisasi secara langsung di Afghanistan. Pembatasan terhadap demonstrasi dan pengawasan terhadap organisasi masyarakat sipil menyebabkan banyak kegiatan advokasi harus dilakukan secara terbatas atau melalui platform digital (Pajhwok Afghan News 2022).

Meskipun demikian, AWN tetap berupaya mempertahankan aktivitas advokasi mereka baik di tingkat domestik maupun internasional. Organisasi ini aktif menggunakan media sosial dan jaringan internasional untuk menyampaikan kondisi perempuan Afghanistan kepada komunitas global. Dalam beberapa kesempatan, AWN juga terlibat dalam forum internasional yang membahas hak perempuan Afghanistan dan mendesak komunitas internasional untuk terus memberikan tekanan terhadap Taliban. Strategi tersebut menunjukkan bahwa meskipun ruang domestik semakin terbatas, organisasi perempuan masih berusaha

memanfaatkan ruang transnasional untuk mempertahankan agenda advokasi mereka (Afghan Women's Network 2023, 9).

Selain fokus pada advokasi internasional, AWN juga tetap berupaya memberikan dukungan kepada perempuan di tingkat lokal. Organisasi ini bekerja sama dengan jaringan komunitas perempuan untuk menyediakan bantuan dasar, informasi hukum, dan dukungan sosial bagi perempuan yang terdampak kebijakan Taliban. Dalam beberapa wilayah, aktivitas tersebut dilakukan secara informal untuk menghindari pengawasan langsung dari otoritas Taliban. (Afghanistan Analysts Network 2023, 21).

2.3.3 Medica Afghanistan

Medica Afghanistan merupakan organisasi yang berfokus pada layanan kesehatan mental, dukungan psikososial, serta perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan berbasis gender di Afghanistan. Organisasi ini merupakan bagian dari jaringan Medica Mondiale yang bekerja di berbagai negara konflik untuk mendukung perempuan korban kekerasan dan trauma. Dalam konteks Afghanistan, Medica Afghanistan memiliki fokus utama pada pemulihan psikologis perempuan yang terdampak konflik bersenjata, kekerasan domestik, dan diskriminasi sosial. Kehadiran organisasi ini menjadi penting karena isu kesehatan mental perempuan sering kali kurang mendapatkan perhatian dalam situasi konflik berkepanjangan (Medica Mondiale 2023, 5).

Sebelum Taliban kembali berkuasa, Medica Afghanistan menjalankan berbagai program dukungan psikososial dan pelatihan bagi tenaga pendamping perempuan di berbagai wilayah Afghanistan. Organisasi ini juga bekerja sama

dengan komunitas lokal untuk meningkatkan kesadaran mengenai kesehatan mental dan kekerasan berbasis gender. Dalam masyarakat Afghanistan yang masih sangat patriarkal, isu kesehatan mental perempuan sering kali dianggap tabu sehingga banyak perempuan mengalami trauma tanpa memperoleh bantuan yang memadai. Oleh karena itu, layanan yang diberikan Medica Afghanistan menjadi penting dalam membantu perempuan memperoleh ruang aman dan dukungan psikologis (Medica Mondiale 2023, 6).

Setelah Taliban kembali berkuasa pada tahun 2021, kebutuhan terhadap layanan kesehatan mental justru meningkat secara signifikan. Banyak perempuan mengalami tekanan psikologis akibat kehilangan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan kebebasan sosial. Selain itu, ketidakpastian politik dan meningkatnya pembatasan terhadap perempuan menyebabkan banyak perempuan mengalami kecemasan, depresi, dan trauma. Medica Afghanistan melaporkan bahwa permintaan terhadap layanan dukungan psikososial meningkat terutama di kalangan perempuan muda di wilayah perkotaan yang sebelumnya memiliki tingkat partisipasi sosial yang lebih tinggi (Medica Mondiale 2023, 7). Dengan demikian, perubahan politik di Afghanistan memiliki dampak langsung terhadap kondisi kesehatan mental perempuan.

Meskipun menghadapi berbagai hambatan, Medica Afghanistan tetap berupaya mempertahankan program mereka melalui penyesuaian strategi operasional. Organisasi ini meningkatkan penggunaan dukungan berbasis komunitas dan pelatihan bagi relawan lokal untuk tetap memberikan layanan kepada perempuan. Selain itu, Medica Afghanistan juga bekerja sama dengan

jaringan internasional untuk mengadvokasi pentingnya perlindungan kesehatan mental perempuan Afghanistan di tengah situasi krisis. Strategi ini menunjukkan bahwa organisasi kemanusiaan dapat beradaptasi dengan kondisi politik yang restriktif sambil tetap mempertahankan sebagian layanan mereka (Medica Mondiale, 2023 10).

BAB 3

Analisis Interaksi NGO dengan Pemerintah Afghanistan di bawah kepemimpinan Taliban

Bab ini menyajikan hasil analisis mengenai interaksi antara Taliban dan NGO dalam merespons diskriminasi terhadap perempuan di Afghanistan periode 2021–2025. Analisis dilakukan menggunakan teori *NGO-State Interactions* yang dikemukakan oleh Sarah S. Stroup dengan meninjau faktor-faktor yang membentuk hubungan antara kedua aktor, yaitu *issue area*, *NGO characteristics*, *state characteristics*, dan *resource flows*. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, bab ini kemudian mengidentifikasi dan menganalisis pola interaksi yang muncul antara Taliban dengan Women for Afghan Women (WAW), Afghan Women's Network (AWN), dan Medica Afghanistan. Melalui analisis tersebut, bab ini bertujuan menjelaskan bagaimana dinamika hubungan yang terbentuk menghasilkan pola *conflict*, *cooperation*, dan *cooptation* dalam upaya merespons diskriminasi terhadap perempuan di Afghanistan selama periode penelitian.

3.1. Faktor-faktor yang Membentuk Pola Interaksi Taliban-NGO

Berdasarkan teori *NGO's Interactions with States* yang dikembangkan oleh Sarah S. Stroup, pola hubungan antara negara dan NGO dipengaruhi oleh empat faktor utama yaitu *issue area*, *NGO characteristics*, *state characteristics*, dan *resource flows*. Keempat faktor tersebut saling berkaitan dalam membentuk hubungan antara Taliban dan NGO di Afghanistan. Dalam penelitian ini, pola interaksi yang paling dominan adalah *conflict* dan *cooptation*, sementara *cooperation* hanya muncul secara terbatas dalam sektor kemanusiaan dan kesehatan. Dominasi pola konflik menunjukkan bahwa isu perempuan merupakan

isu yang sangat sensitif secara politik dan ideologis bagi Taliban. Di sisi lain, keberlangsungan bantuan kemanusiaan menyebabkan Taliban tetap membuka ruang terbatas bagi beberapa NGO untuk beroperasi. (Stroup 2012, 36)

3.1.1 Issue Area

Menurut Sarah S. Stroup, *issue area* merupakan salah satu faktor yang paling penting dalam membentuk pola interaksi antara negara dan NGO. Karakteristik isu yang ditangani NGO dapat memengaruhi bagaimana negara merespons keberadaan organisasi tersebut. Beberapa isu cenderung menghasilkan hubungan yang kooperatif, sedangkan isu lain lebih rentan menimbulkan konflik karena berkaitan dengan kepentingan politik, identitas, atau legitimasi negara (Stroup 2012, 33). Dalam konteks Afghanistan pasca 2021, isu diskriminasi terhadap perempuan merupakan isu yang memiliki sensitivitas politik dan ideologis yang sangat tinggi. Oleh karena itu, karakteristik isu ini menjadi faktor utama yang memengaruhi hubungan antara Taliban dan NGO yang berfokus pada perlindungan hak perempuan.

Sensitivitas isu perempuan di Afghanistan tidak dapat dilepaskan dari ideologi yang dianut Taliban. Sejak pertama kali berkuasa pada tahun 1996, Taliban telah menerapkan berbagai kebijakan yang membatasi ruang gerak perempuan dalam kehidupan sosial dan politik. Setelah kembali mengambil alih kekuasaan pada Agustus 2021, Taliban kembali menerapkan kebijakan yang membatasi akses perempuan terhadap pendidikan, pekerjaan, mobilitas, dan partisipasi politik (Human Rights Watch 2023, 4–6). Pada September 2021,

sekolah menengah untuk anak perempuan ditutup di sebagian besar wilayah Afghanistan dan hingga beberapa tahun berikutnya larangan tersebut tetap dipertahankan (UNESCO 2023, 5–6). Pada Desember 2022, Taliban juga melarang perempuan mengakses pendidikan tinggi melalui keputusan Kementerian Pendidikan Tinggi Afghanistan (UN Women 2023, 6). Kebijakan-kebijakan tersebut menunjukkan bahwa isu perempuan bukan sekadar persoalan sosial, melainkan bagian dari proyek politik dan ideologis Taliban.

Karakteristik isu perempuan menjadi semakin sensitif karena berkaitan langsung dengan legitimasi pemerintahan Taliban. Bagi Taliban, pembatasan terhadap perempuan dipandang sebagai bagian dari upaya menjaga nilai-nilai Islam dan tatanan sosial yang mereka yakini. Dalam berbagai pernyataan resmi, Taliban menyatakan bahwa kebijakan terhadap perempuan dilakukan untuk memastikan kesesuaian kehidupan sosial dengan prinsip-prinsip syariah (TOLONews 2023). Sebaliknya, NGO seperti WAW, AWN, dan Medica Afghanistan memandang bahwa perempuan memiliki hak untuk memperoleh pendidikan, pekerjaan, perlindungan hukum, dan partisipasi dalam kehidupan publik. Perbedaan cara pandang tersebut menyebabkan isu perempuan menjadi arena kontestasi nilai antara Taliban dan NGO. Dengan demikian, konflik yang muncul tidak hanya berkaitan dengan kebijakan, tetapi juga berkaitan dengan perbedaan ideologi dan nilai yang mendasari tujuan masing-masing aktor.

Selain berkaitan dengan ideologi, isu perempuan juga memiliki dimensi politik yang kuat. Banyak NGO perempuan tidak hanya menyediakan layanan kemanusiaan, tetapi juga melakukan advokasi terhadap kebijakan yang dianggap

diskriminatif. Afghan Women's Network, misalnya, secara konsisten menyerukan pembukaan kembali akses pendidikan bagi perempuan dan peningkatan partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan politik (Afghan Women's Network 2023, 8–9). Aktivitas advokasi tersebut sering kali dipandang Taliban sebagai bentuk tantangan terhadap otoritas pemerintah *de facto*. Human Rights Watch mencatat bahwa sejumlah aktivis perempuan dan anggota organisasi masyarakat sipil mengalami intimidasi, ancaman, bahkan penahanan setelah mengikuti demonstrasi terkait hak perempuan (Human Rights Watch 2023, 17–18). Situasi tersebut menunjukkan bahwa isu perempuan memiliki konsekuensi politik yang membuat hubungan Taliban dan NGO menjadi lebih rentan terhadap konflik.

Karakteristik isu perempuan juga berbeda dengan isu bantuan kemanusiaan yang lebih bersifat teknis. Pada sektor bantuan pangan, kesehatan dasar, dan bantuan musim dingin, Taliban relatif lebih pragmatis karena bantuan tersebut dibutuhkan untuk menjaga stabilitas sosial dan mengurangi tekanan ekonomi masyarakat. Sebaliknya, isu hak perempuan menyentuh aspek identitas dan legitimasi yang dianggap fundamental oleh Taliban. Afghanistan Analysts Network mencatat bahwa elite Taliban yang berbasis di Kandahar memiliki pengaruh besar dalam menentukan kebijakan terhadap perempuan dan cenderung mempertahankan pendekatan yang lebih konservatif dibandingkan sejumlah pejabat Taliban di tingkat lokal (Jackson 2023, 9–11). Oleh karena itu, NGO yang bekerja pada isu perempuan menghadapi tingkat resistensi yang lebih tinggi dibandingkan NGO yang bergerak dalam bantuan kemanusiaan umum.

Meskipun demikian, sensitivitas isu perempuan tidak selalu menghasilkan hubungan yang sepenuhnya konflikual. Dalam beberapa kasus, kebutuhan praktis di lapangan mendorong Taliban untuk tetap memberikan ruang terbatas bagi program-program yang berkaitan dengan perempuan. Contohnya dapat dilihat pada sektor kesehatan. Dalam masyarakat Afghanistan, perempuan sering kali hanya dapat memperoleh layanan kesehatan dari tenaga kesehatan perempuan karena norma sosial dan budaya yang berlaku. Oleh sebab itu, Taliban tetap memberikan pengecualian terbatas terhadap beberapa program kesehatan yang melibatkan tenaga perempuan agar layanan kesehatan masyarakat dapat terus berjalan (World Health Organization 2023, 12–13). Kondisi ini menunjukkan bahwa karakteristik isu tertentu dapat menciptakan ruang kerja sama meskipun terdapat perbedaan ideologis yang mendasar antara Taliban dan NGO.

Selain itu, karakteristik isu perempuan juga memengaruhi tingkat pengawasan yang diberikan Taliban terhadap NGO. Organisasi yang secara terbuka mengadvokasi kesetaraan gender cenderung menghadapi pengawasan yang lebih ketat dibandingkan organisasi yang berfokus pada bantuan kemanusiaan. Laporan Pajhwok Afghan News menunjukkan bahwa sejumlah organisasi perempuan mengalami pembatasan aktivitas dan kesulitan memperoleh izin operasional setelah Taliban memperketat regulasi terhadap organisasi masyarakat sipil (Pajhwok Afghan News 2023). Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa sensitivitas isu perempuan secara langsung memengaruhi ruang gerak NGO di Afghanistan. Dengan demikian, issue area tidak hanya menentukan bentuk hubungan yang muncul, tetapi juga memengaruhi kemampuan NGO dalam menjalankan program mereka.

3.1.2 NGO Characteristics

NGO characteristics merupakan salah satu faktor yang memengaruhi pola interaksi antara NGO dan negara. Stroup menjelaskan bahwa setiap NGO memiliki tujuan, strategi, sumber daya, struktur organisasi, dan tingkat ketergantungan yang berbeda sehingga menghasilkan hubungan yang berbeda pula dengan negara (Stroup 2012, 34). NGO yang berfokus pada advokasi kebijakan cenderung lebih sering mengalami konflik dengan negara dibandingkan NGO yang berfokus pada penyediaan layanan kemanusiaan. Selain itu, NGO yang memiliki jaringan internasional yang kuat umumnya memiliki kapasitas lebih besar untuk melakukan tekanan politik terhadap negara, tetapi pada saat yang sama lebih rentan dipersepsikan sebagai aktor eksternal yang membawa pengaruh asing. Dalam konteks Afghanistan pasca 2021, karakteristik organisasi menjadi faktor penting yang menjelaskan mengapa Women for Afghan Women (WAW), Afghan Women's Network (AWN), dan Medica Afghanistan mengalami pola interaksi yang berbeda dengan Taliban. Meskipun ketiga organisasi tersebut sama-sama berfokus pada perlindungan perempuan, pendekatan yang digunakan masing-masing organisasi tidak sepenuhnya sama. Oleh karena itu, karakteristik NGO menjadi faktor yang turut membentuk dinamika hubungan mereka dengan Taliban.

Women for Afghan Women merupakan organisasi yang menggabungkan fungsi layanan kemanusiaan dan advokasi hak perempuan. Sebelum Taliban kembali berkuasa, WAW mengelola berbagai program seperti *women protection centers*, bantuan hukum, pendidikan, pelatihan keterampilan, serta dukungan

psikososial bagi perempuan yang mengalami kekerasan berbasis gender (Women for Afghan Women 2023, 7–10). Karakteristik ini membuat WAW tidak hanya berperan sebagai penyedia layanan sosial, tetapi juga sebagai organisasi yang secara aktif memperjuangkan perlindungan hak perempuan. Di satu sisi, program-program kemanusiaan yang dijalankan WAW memungkinkan organisasi tersebut tetap memiliki ruang interaksi dengan otoritas lokal Taliban. Namun di sisi lain, fokus WAW terhadap perlindungan perempuan korban kekerasan sering kali bertentangan dengan kebijakan dan pandangan Taliban mengenai posisi perempuan dalam keluarga dan masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan WAW berada dalam posisi yang kompleks antara kebutuhan untuk mempertahankan layanan kemanusiaan dan upaya mempertahankan prinsip perlindungan hak perempuan. Karakteristik ganda inilah yang kemudian memungkinkan munculnya pola *conflict*, *cooperation*, maupun *cooptation* dalam hubungan WAW dengan Taliban.

Berbeda dengan WAW, Afghan Women's Network memiliki karakteristik yang lebih kuat sebagai organisasi advokasi dan jaringan masyarakat sipil perempuan. AWN didirikan sebagai jaringan yang menghubungkan berbagai organisasi perempuan di Afghanistan dengan tujuan memperkuat partisipasi perempuan dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik (Afghan Women's Network 2023, 5–8). Setelah Taliban kembali berkuasa, AWN secara konsisten menyuarakan kritik terhadap kebijakan yang membatasi pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi politik perempuan. Organisasi ini juga aktif menggunakan forum internasional untuk menyampaikan kondisi perempuan Afghanistan kepada komunitas global. Karakteristik tersebut membuat AWN lebih sering

dipersepsikan Taliban sebagai organisasi yang menentang kebijakan negara dibandingkan sebagai mitra dalam penyediaan layanan kemanusiaan. Human Rights Watch mencatat bahwa organisasi perempuan dan aktivis yang memperjuangkan hak-hak perempuan menghadapi tingkat pengawasan dan intimidasi yang lebih tinggi dibandingkan organisasi yang berfokus pada bantuan kemanusiaan (Human Rights Watch 2023, 17–18). Oleh karena itu, karakteristik AWN sebagai organisasi advokasi berkontribusi besar terhadap munculnya pola *conflict* dalam hubungannya dengan Taliban.

Sementara itu, Medica Afghanistan memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan kedua organisasi tersebut. Organisasi ini lebih berfokus pada layanan kesehatan mental, dukungan psikososial, dan perlindungan perempuan korban kekerasan berbasis gender daripada advokasi politik secara langsung (Medica Mondiale 2023, 5–7). Sebagian besar program yang dijalankan Medica Afghanistan berkaitan dengan pemulihan trauma, konseling, dan peningkatan kapasitas komunitas dalam menangani kesehatan mental perempuan. Fokus yang lebih teknis dan kemanusiaan tersebut membuat Medica Afghanistan relatif lebih mudah diterima oleh otoritas lokal Taliban dibandingkan organisasi yang secara aktif melakukan advokasi hak perempuan. Meskipun tetap menghadapi berbagai pembatasan operasional, organisasi ini memiliki ruang yang lebih besar untuk melakukan negosiasi terkait pelaksanaan program di lapangan. Dengan demikian, karakteristik Medica Afghanistan sebagai penyedia layanan kemanusiaan berkontribusi terhadap munculnya pola kerja sama terbatas dan kooptasi dibandingkan konflik terbuka. Kondisi ini menunjukkan bahwa perbedaan fokus

organisasi dapat menghasilkan pola interaksi yang berbeda meskipun bekerja pada isu yang sama.

Karakteristik NGO juga dapat dilihat dari hubungan mereka dengan jaringan internasional. Ketiga organisasi yang menjadi fokus penelitian memiliki koneksi dengan donor, organisasi internasional, dan jaringan advokasi transnasional. Menurut Stroup, hubungan dengan jaringan internasional dapat meningkatkan kapasitas NGO dalam memperoleh sumber daya dan dukungan politik, tetapi juga dapat meningkatkan kecurigaan negara terhadap organisasi tersebut (Stroup 2012, 34–35). Dalam konteks Afghanistan, Taliban sering menuduh sebagian organisasi perempuan membawa agenda yang dianggap berasal dari Barat dan tidak sesuai dengan budaya maupun interpretasi Islam yang mereka anut. Pandangan tersebut terutama ditujukan kepada organisasi yang aktif menggunakan forum internasional untuk mengkritik kebijakan Taliban terhadap perempuan. Afghanistan Analysts Network mencatat bahwa Taliban menunjukkan tingkat penerimaan yang berbeda terhadap NGO, tergantung pada sejauh mana organisasi tersebut dianggap terlibat dalam advokasi politik atau sekadar menjalankan program kemanusiaan (Afghanistan Analysts Network 2023, 21–23).

Selain itu, karakteristik NGO juga berkaitan dengan strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. AWN cenderung menggunakan strategi advokasi, kampanye publik, dan mobilisasi jaringan masyarakat sipil untuk memperjuangkan hak perempuan. Sebaliknya, Medica Afghanistan lebih banyak menggunakan pendekatan berbasis layanan dan kerja komunitas. WAW berada di antara kedua pendekatan tersebut karena menggabungkan aktivitas

advokasi dengan penyediaan layanan perlindungan perempuan. Perbedaan strategi ini sangat penting dalam menjelaskan variasi pola interaksi yang muncul. Menurut Stroup, NGO yang menggunakan strategi advokasi politik umumnya lebih rentan mengalami konflik dengan negara dibandingkan NGO yang berfokus pada penyediaan layanan sosial (Stroup 2012, 34). Dalam kasus Afghanistan, pola tersebut terlihat dari hubungan AWN yang lebih konfrontatif dibandingkan hubungan Medica Afghanistan yang lebih pragmatis.

Karakteristik NGO juga memengaruhi kemampuan organisasi untuk beradaptasi terhadap perubahan politik. Setelah Taliban kembali berkuasa, banyak NGO harus menyesuaikan program, metode kerja, dan strategi operasional mereka agar dapat tetap memberikan layanan kepada masyarakat. Women for Afghan Women misalnya mengurangi visibilitas beberapa program dan meningkatkan koordinasi dengan komunitas lokal untuk mempertahankan layanan bagi perempuan (Women for Afghan Women 2023, 10–12). Medica Afghanistan meningkatkan penggunaan pendekatan berbasis komunitas dan pelatihan relawan lokal agar program kesehatan mental tetap berjalan (Medica Mondiale 2023, 10–11). Sebaliknya, AWN lebih banyak memanfaatkan ruang transnasional dan platform digital untuk mempertahankan aktivitas advokasi mereka (Afghan Women's Network 2023, 9–10). Perbedaan kemampuan dan strategi adaptasi tersebut turut menentukan bagaimana masing-masing organisasi berinteraksi dengan Taliban setelah tahun 2021.

3.1.3 State Characteristics

State characteristics merupakan salah satu faktor utama yang membentuk pola interaksi antara negara dan NGO. Karakteristik tersebut mencakup bentuk rezim, kapasitas pemerintahan, tingkat keterbukaan politik, serta cara negara memandang aktor-aktor masyarakat sipil yang beroperasi di wilayahnya (Stroup 2012, 34–35). Negara yang memiliki sistem politik terbuka cenderung lebih menerima keberadaan NGO sebagai mitra dalam proses pembangunan dan penyediaan layanan publik. Sebaliknya, negara yang memiliki karakter otoriter umumnya lebih curiga terhadap NGO, terutama organisasi yang melakukan advokasi kebijakan atau mendorong perubahan sosial yang dianggap bertentangan dengan kepentingan pemerintah. Dalam konteks Afghanistan pasca 2021, karakteristik Taliban sebagai rezim *authoritarian-theocratic* memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pola hubungan yang terbentuk dengan NGO. Oleh karena itu, untuk memahami munculnya pola *conflict*, *cooperation*, dan *cooptation*, penting untuk menganalisis bagaimana karakteristik Taliban membentuk interaksi mereka dengan organisasi-organisasi yang memperjuangkan hak perempuan. Karakteristik negara dalam penelitian ini tidak hanya berkaitan dengan kapasitas pemerintahan Taliban, tetapi juga berkaitan dengan ideologi dan sumber legitimasi politik yang mereka gunakan.

Setelah kembali berkuasa pada Agustus 2021, Taliban membentuk pemerintahan *de facto* yang berlandaskan konsep Emirat Islam Afghanistan. Struktur pemerintahan tersebut sangat terpusat dan didominasi oleh elite Taliban yang sebagian besar berasal dari kalangan ulama serta tokoh-tokoh senior gerakan

Taliban (International Crisis Group 2022, 4–6). Berbeda dengan pemerintahan Afghanistan sebelum tahun 2021 yang menerapkan sistem republik dengan mekanisme pemilu, Taliban menempatkan otoritas tertinggi pada Amir Haibatullah Akhundzada yang memiliki kewenangan besar dalam menentukan arah kebijakan negara. Menurut laporan International Crisis Group, proses pengambilan keputusan dalam pemerintahan Taliban cenderung berlangsung secara tertutup dan terpusat pada lingkaran elite yang berbasis di Kandahar (International Crisis Group 2022, 7). Kondisi tersebut menyebabkan ruang partisipasi masyarakat sipil dalam proses pembuatan kebijakan menjadi sangat terbatas. Dalam situasi seperti ini, NGO tidak memiliki banyak saluran formal untuk memengaruhi kebijakan negara. Akibatnya, hubungan antara Taliban dan NGO lebih rentan menghasilkan konflik dibandingkan negosiasi yang bersifat institusional.

Karakteristik Taliban sebagai rezim *authoritarian-theocratic* juga terlihat dari cara mereka memandang isu perempuan. Bagi Taliban, kebijakan terhadap perempuan bukan sekadar kebijakan sosial, melainkan bagian dari identitas politik dan ideologi pemerintahan mereka. Berbagai pembatasan terhadap pendidikan, pekerjaan, dan mobilitas perempuan dipandang oleh Taliban sebagai implementasi nilai-nilai Islam berdasarkan interpretasi yang mereka yakini (UN Women 2023, 6–8). Karena itu, setiap upaya untuk menentang atau mengubah kebijakan tersebut sering kali dipandang sebagai tantangan terhadap legitimasi pemerintahan Taliban. Menurut Human Rights Watch, Taliban secara konsisten menolak kritik terhadap kebijakan perempuan dengan alasan bahwa urusan tersebut merupakan bagian dari kedaulatan dan nilai-nilai Islam Afghanistan (Human Rights Watch 2023,

8–10). Situasi ini menyebabkan NGO yang memperjuangkan kesetaraan gender berada dalam posisi yang sulit karena agenda yang mereka usung dipandang bertentangan dengan salah satu fondasi ideologis pemerintahan Taliban. Dengan demikian, karakteristik ideologis negara menjadi salah satu penyebab utama munculnya pola konflik antara Taliban dan NGO perempuan.

Karakteristik negara juga terlihat dari kecenderungan Taliban untuk mengontrol ruang publik dan aktivitas masyarakat sipil. Setelah tahun 2021, Taliban menerapkan berbagai regulasi yang membatasi demonstrasi, aktivitas organisasi perempuan, serta kebebasan berekspresi di Afghanistan (UNAMA 2024, 11–13). Sejumlah aktivis perempuan yang melakukan demonstrasi menuntut hak pendidikan dan pekerjaan dilaporkan mengalami intimidasi, penahanan, maupun pengawasan oleh aparat Taliban (Human Rights Watch 2023, 17–18). Pembatasan tersebut menunjukkan bahwa Taliban memiliki kecenderungan untuk memandang aktivitas masyarakat sipil sebagai potensi ancaman terhadap stabilitas politik. Dalam perspektif Stroup, karakteristik negara yang cenderung membatasi ruang gerak organisasi masyarakat sipil akan meningkatkan kemungkinan munculnya hubungan yang konflikual dengan NGO (Stroup 2012, 35). Oleh karena itu, karakter Taliban sebagai rezim yang menempatkan kontrol politik sebagai prioritas turut memengaruhi pola hubungan yang berkembang dengan WAW, AWN, dan Medica Afghanistan.

Karakteristik Taliban juga menjelaskan mengapa penutupan shelter perempuan yang dikelola NGO tidak dapat dipahami semata-mata sebagai keputusan administratif. Sebelum Taliban kembali berkuasa, berbagai organisasi

seperti Women for Afghan Women mengelola *women protection centers* atau shelter yang berfungsi sebagai tempat perlindungan bagi perempuan korban kekerasan domestik, pernikahan paksa, dan berbagai bentuk kekerasan berbasis gender (Women for Afghan Women 2023, 7–8). Namun setelah Taliban mengambil alih kekuasaan, banyak shelter terpaksa ditutup atau mengalami pembatasan operasional yang signifikan. Menurut laporan United States Institute of Peace, sejumlah tokoh Taliban memandang shelter perempuan sebagai institusi yang dianggap mendorong perempuan untuk hidup di luar pengawasan keluarga laki-laki dan bertentangan dengan tatanan sosial yang mereka yakini (United States Institute of Peace 2022, 5–7). Dengan demikian, penutupan shelter tidak hanya berkaitan dengan perubahan pemerintahan, tetapi juga mencerminkan perbedaan pandangan mendasar mengenai perlindungan perempuan. Bukti tersebut menunjukkan bahwa konflik antara Taliban dan NGO berakar pada perbedaan nilai serta ideologi, bukan sekadar pada persoalan teknis pelaksanaan program.

Meskipun memiliki karakter yang cenderung restriktif, Taliban juga menunjukkan sikap pragmatis dalam beberapa sektor tertentu. Setelah tahun 2021, Afghanistan menghadapi krisis ekonomi dan kemanusiaan yang sangat serius akibat pembekuan aset negara, menurunnya bantuan internasional, serta memburuknya kondisi sosial masyarakat (World Bank 2023, 9–10). Dalam situasi tersebut, Taliban tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat tanpa dukungan organisasi kemanusiaan. Oleh karena itu, Taliban tetap memberikan ruang operasional terbatas kepada sejumlah NGO yang bergerak dalam bidang kesehatan, bantuan pangan, dan bantuan darurat. Sikap

pragmatis tersebut menunjukkan bahwa karakteristik negara tidak selalu menghasilkan hubungan yang sepenuhnya konflikual. Dalam kondisi tertentu, kebutuhan praktis negara justru membuka peluang bagi kerja sama dengan NGO. Dengan demikian, karakteristik Taliban tidak hanya menjelaskan munculnya konflik, tetapi juga membantu menjelaskan mengapa kerja sama terbatas tetap dapat terjadi.

Selain itu, karakteristik negara juga memengaruhi munculnya pola *cooptation*. Taliban tidak sepenuhnya menolak keberadaan NGO, tetapi berusaha memastikan bahwa aktivitas organisasi tersebut tetap berada dalam batas yang dapat dikendalikan oleh pemerintah *de facto*. Berbagai regulasi mengenai izin operasional, penggunaan staf perempuan, pelaksanaan program, serta distribusi bantuan menunjukkan adanya upaya negara untuk mengontrol aktivitas NGO (OCHA 2024, 6–7). Dalam banyak kasus, NGO tetap dapat beroperasi apabila bersedia menyesuaikan program mereka dengan aturan yang ditetapkan Taliban. Situasi tersebut menunjukkan bahwa Taliban tidak hanya menggunakan pendekatan represif, tetapi juga menggunakan mekanisme kontrol untuk mengarahkan aktivitas NGO agar sesuai dengan kepentingan negara. Dalam kerangka Stroup, kondisi semacam ini merupakan salah satu ciri munculnya pola *cooptation*, yaitu ketika negara berupaya mengendalikan NGO tanpa harus menghapus keberadaan organisasi tersebut sepenuhnya (Stroup 2012, 35).

3.1.4 Resource Flows

Resource flows merupakan faktor yang berkaitan dengan aliran sumber daya antara negara, NGO, donor internasional, dan masyarakat yang menjadi penerima manfaat program. Faktor ini penting karena hubungan antara negara dan NGO tidak hanya ditentukan oleh kesamaan atau perbedaan tujuan, tetapi juga oleh kebutuhan terhadap sumber daya yang dimiliki masing-masing pihak (Stroup 2012, 34–35). Dalam banyak kasus, negara dan NGO dapat tetap menjalin hubungan meskipun memiliki perbedaan ideologi yang signifikan karena keduanya saling membutuhkan akses terhadap sumber daya tertentu. Negara membutuhkan bantuan, keahlian, dan layanan yang disediakan NGO, sementara NGO membutuhkan akses wilayah, izin operasional, dan jaminan keamanan dari negara agar program dapat berjalan. Oleh karena itu, *resource flows* sering kali menjadi faktor yang menjelaskan mengapa kerja sama maupun kooptasi dapat muncul di tengah hubungan yang secara umum bersifat konflikual. Dalam konteks Afghanistan pasca 2021, faktor ini menjadi sangat penting karena negara dan NGO sama-sama menghadapi situasi krisis kemanusiaan yang berat. Kondisi tersebut menyebabkan hubungan Taliban dan NGO tidak dapat dijelaskan hanya melalui perbedaan ideologi semata.

Setelah Taliban kembali berkuasa pada Agustus 2021, Afghanistan mengalami salah satu krisis kemanusiaan terbesar di dunia. Pembekuan aset Afghanistan di luar negeri, penghentian sebagian bantuan pembangunan internasional, meningkatnya angka kemiskinan, serta menurunnya aktivitas

ekonomi menyebabkan jutaan masyarakat menghadapi kesulitan memenuhi kebutuhan dasar mereka (World Bank 2023, 3–5). Menurut laporan United Nations Development Programme (UNDP), lebih dari dua pertiga penduduk Afghanistan hidup dalam kondisi rentan terhadap kemiskinan setelah perubahan rezim pada tahun 2021 (UNDP 2023, 7). Situasi tersebut menciptakan kebutuhan yang sangat besar terhadap bantuan kemanusiaan yang sebagian besar disalurkan melalui organisasi internasional dan NGO. Dalam kondisi seperti ini, Taliban tidak memiliki kapasitas fiskal maupun administratif yang cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat secara mandiri. Oleh karena itu, keberadaan NGO menjadi sangat penting bagi keberlangsungan berbagai layanan kemanusiaan di Afghanistan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Taliban memiliki kepentingan praktis untuk tetap mempertahankan keberadaan organisasi-organisasi kemanusiaan meskipun terdapat berbagai perbedaan politik dan ideologis.

Di sisi lain, NGO juga memiliki ketergantungan terhadap Taliban sebagai otoritas *de facto* yang mengendalikan wilayah Afghanistan. Meskipun banyak NGO memperoleh pendanaan dari donor internasional, mereka tetap membutuhkan akses lapangan agar bantuan dapat disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Tanpa izin operasional dan jaminan keamanan dari Taliban, berbagai program kemanusiaan akan sulit dilaksanakan secara efektif. Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (OCHA) mencatat bahwa sebagian besar organisasi kemanusiaan di Afghanistan harus melakukan koordinasi dengan otoritas Taliban untuk memperoleh akses ke wilayah operasional mereka (OCHA 2024, 6–7). Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara Taliban dan NGO bersifat saling bergantung. Taliban membutuhkan

bantuan yang dibawa NGO, sedangkan NGO membutuhkan akses yang dikendalikan Taliban. Hubungan saling ketergantungan tersebut menjadi salah satu faktor utama yang menjelaskan munculnya kerja sama terbatas di tengah berbagai konflik yang terjadi.

Pengaruh *resource flows* dapat terlihat secara jelas dalam sektor bantuan pangan dan bantuan darurat. Setelah tahun 2021, jutaan warga Afghanistan bergantung pada bantuan kemanusiaan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari akibat meningkatnya kemiskinan dan kerawanan pangan (World Food Programme 2023, 2–4). Banyak NGO internasional dan lokal terlibat dalam distribusi bantuan pangan, bantuan musim dingin, bantuan tunai, serta layanan dasar lainnya. Dalam berbagai kasus, Taliban mengizinkan program-program tersebut berjalan karena bantuan tersebut membantu mengurangi tekanan sosial dan ekonomi yang dihadapi masyarakat. TOLONews melaporkan bahwa sejumlah program bantuan kemanusiaan tetap beroperasi di berbagai provinsi Afghanistan melalui koordinasi dengan otoritas lokal Taliban meskipun terdapat berbagai pembatasan terhadap NGO perempuan (TOLONews 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan sumber daya yang dibawa NGO dapat mendorong munculnya pola *cooperation*. Dengan kata lain, kerja sama terjadi bukan karena kesamaan ideologi, tetapi karena adanya kebutuhan praktis yang dimiliki kedua pihak.

Faktor *resource flows* juga terlihat dalam sektor kesehatan. Afghanistan menghadapi berbagai tantangan kesehatan setelah tahun 2021, termasuk keterbatasan fasilitas kesehatan, kekurangan tenaga medis, dan meningkatnya

kebutuhan layanan kesehatan dasar. Dalam situasi tersebut, NGO memainkan peran penting dalam penyediaan layanan kesehatan, termasuk layanan kesehatan ibu dan anak yang sangat dibutuhkan masyarakat. Menurut World Health Organization (WHO), berbagai layanan kesehatan di Afghanistan tetap dapat beroperasi berkat dukungan organisasi kemanusiaan dan jaringan NGO yang bekerja sama dengan komunitas lokal (WHO 2023, 12–13). Taliban menyadari bahwa penghentian seluruh aktivitas NGO akan memperburuk kondisi kesehatan masyarakat dan berpotensi menimbulkan ketidakstabilan sosial. Oleh karena itu, meskipun Taliban membatasi aktivitas perempuan dalam berbagai sektor, mereka tetap memberikan pengecualian tertentu bagi tenaga kesehatan perempuan dalam beberapa layanan kesehatan (WHO 2023, 13). Situasi ini memperlihatkan bahwa kebutuhan terhadap sumber daya dan layanan yang disediakan NGO dapat mendorong munculnya hubungan yang lebih kooperatif.

Selain menghasilkan kerja sama, *resource flows* juga berkontribusi terhadap munculnya pola *cooptation*. Taliban memahami bahwa bantuan internasional yang disalurkan melalui NGO memiliki nilai strategis bagi stabilitas pemerintahan mereka. Oleh karena itu, Taliban berupaya memastikan bahwa aliran bantuan tersebut tetap berada di bawah pengawasan dan kontrol pemerintah *de facto*. Afghanistan Analysts Network mencatat bahwa dalam beberapa kasus Taliban meminta NGO untuk berkoordinasi dengan pejabat lokal atau tokoh masyarakat yang memiliki hubungan dengan pemerintah sebelum mendistribusikan bantuan kemanusiaan (Afghanistan Analysts Network 2023, 26–27). Melalui mekanisme tersebut, Taliban tidak hanya memperoleh manfaat dari bantuan yang masuk, tetapi juga dapat memperkuat pengaruh politik mereka

di tingkat lokal. Dengan demikian, sumber daya yang dibawa NGO tidak hanya memiliki nilai kemanusiaan, tetapi juga memiliki nilai politik bagi negara. Kondisi inilah yang menjadi salah satu ciri munculnya pola kooptasi dalam hubungan Taliban dan NGO.

Faktor *resource flows* juga memengaruhi strategi organisasi perempuan yang menjadi fokus penelitian ini. Women for Afghan Women, Afghan Women's Network, dan Medica Afghanistan sama-sama bergantung pada pendanaan internasional untuk menjalankan program mereka. Namun, untuk dapat mempertahankan akses kepada masyarakat Afghanistan, organisasi-organisasi tersebut harus menyesuaikan strategi operasional mereka dengan kondisi politik yang berkembang setelah Taliban kembali berkuasa. Women for Afghan Women misalnya melakukan berbagai penyesuaian program untuk mempertahankan layanan bagi perempuan yang membutuhkan perlindungan (Women for Afghan Women 2023, 10–12). Medica Afghanistan juga meningkatkan pendekatan berbasis komunitas agar layanan kesehatan mental tetap dapat diberikan kepada perempuan di berbagai wilayah (Medica Mondiale 2023, 10–11). Sementara itu, Afghan Women's Network memanfaatkan jaringan internasional untuk mempertahankan advokasi terhadap hak-hak perempuan Afghanistan (Afghan Women's Network 2023, 9–10). Berbagai bentuk adaptasi tersebut menunjukkan bahwa aliran sumber daya tidak hanya memengaruhi hubungan negara dan NGO, tetapi juga memengaruhi strategi yang digunakan organisasi dalam menjalankan program mereka.

Meskipun demikian, ketergantungan terhadap sumber daya juga menciptakan dilema bagi NGO. Di satu sisi, organisasi perlu bekerja sama dengan Taliban agar bantuan dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Namun di sisi lain, kerja sama yang terlalu jauh berisiko membuat organisasi dianggap menerima atau melegitimasi kebijakan diskriminatif yang diterapkan Taliban. Dilema tersebut terutama dirasakan oleh NGO yang bekerja pada isu hak perempuan karena mereka harus menyeimbangkan antara prinsip perlindungan hak asasi manusia dan kebutuhan untuk mempertahankan akses operasional di lapangan (UN Women 2023, 18–19). Situasi ini menunjukkan bahwa *resource flows* tidak selalu menghasilkan hubungan yang harmonis. Sebaliknya, faktor tersebut sering kali menciptakan hubungan yang kompleks, di mana kerja sama, konflik, dan kooptasi dapat muncul secara bersamaan dalam konteks yang berbeda.

3.2 Pola Interaksi Taliban-NGO dalam isu Diskriminasi Perempuan

Berdasarkan teori Stroup, interaksi antara negara dan NGO dapat dikategorikan ke dalam empat pola utama yaitu, conflict, cooperation, competition, dan cooptation. Pola-pola ini ditentukan oleh kesamaan atau perbedaan dalam tujuan (*ends*) dan strategi (*means*) antara kedua aktor. Dalam konteks Taliban dan NGO yang merespons isu diskriminasi perempuan di Afghanistan, keempat pola ini termanifestasi dengan karakteristik yang unik dan kompleks.

3.2.1 Pola Conflict

Pola *conflict* muncul ketika negara dan NGO memiliki tujuan (*ends*) serta strategi (*means*) yang berbeda dalam merespons suatu isu (Stroup 2012, 33). Dalam kondisi ini, kedua aktor berupaya mencapai tujuan yang saling bertentangan sehingga hubungan yang terbentuk cenderung diwarnai oleh ketegangan, resistensi, dan pertentangan kebijakan. Dalam konteks Afghanistan pasca 2021, pola *conflict* terlihat jelas dalam hubungan antara Taliban dan NGO yang berupaya memperjuangkan hak-hak perempuan. Taliban berusaha membangun kembali tatanan sosial berdasarkan interpretasi syariah yang mereka yakini, sementara NGO seperti Women for Afghan Women, Afghan Women's Network, dan Medica Afghanistan berupaya mempertahankan akses perempuan terhadap pendidikan, pekerjaan, perlindungan hukum, dan partisipasi sosial. Perbedaan tujuan tersebut menciptakan dasar konflik yang kuat antara kedua aktor. Selain itu, strategi yang digunakan Taliban dan NGO untuk mencapai tujuan masing-masing juga berbeda secara fundamental. Oleh karena itu, hubungan antara Taliban dan NGO dalam isu diskriminasi terhadap perempuan menunjukkan karakteristik yang sesuai dengan pola *conflict* menurut kerangka Stroup.

Perbedaan tujuan antara Taliban dan NGO terlihat jelas dalam isu pendidikan perempuan. Setelah kembali berkuasa pada Agustus 2021, Taliban secara bertahap membatasi akses perempuan terhadap pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Pada Maret 2022, Taliban menunda pembukaan kembali sekolah menengah untuk anak perempuan hanya beberapa jam sebelum sekolah

dijadwalkan dibuka, dan pada Desember 2022 Taliban secara resmi melarang perempuan mengikuti pendidikan tinggi di universitas (UNESCO 2023, 5–6; UN Women 2023, 6). Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa Taliban memandang pembatasan pendidikan perempuan sebagai bagian dari sistem sosial yang ingin mereka bangun. Sebaliknya, NGO seperti Afghan Women's Network secara aktif mengadvokasi hak perempuan untuk memperoleh pendidikan tanpa diskriminasi dan secara terbuka menyerukan pencabutan berbagai pembatasan yang diterapkan Taliban (Afghan Women's Network 2023, 8–9). Dengan demikian, kedua aktor memiliki tujuan yang saling bertentangan dalam isu pendidikan perempuan. Taliban berupaya mempertahankan kebijakan pembatasan, sedangkan NGO berupaya menghapus pembatasan tersebut. Perbedaan tujuan ini menjadi salah satu indikator utama munculnya pola *conflict*.

Selain perbedaan tujuan, konflik juga muncul karena perbedaan strategi yang digunakan oleh kedua aktor. Taliban menggunakan instrumen negara berupa dekrit, regulasi, dan pembatasan administratif untuk mengendalikan ruang gerak perempuan di Afghanistan. Berbagai kebijakan mengenai pendidikan, pekerjaan, dan mobilitas perempuan diterapkan melalui keputusan resmi pemerintah *de facto* yang memiliki kekuatan mengikat secara nasional (UNAMA 2024, 8–10). Sebaliknya, NGO menggunakan strategi advokasi, kampanye publik, dokumentasi pelanggaran hak asasi manusia, serta mobilisasi dukungan internasional untuk menentang kebijakan tersebut. Afghan Women's Network, misalnya, secara aktif bekerja sama dengan jaringan organisasi perempuan dan lembaga internasional untuk menyuarakan dampak kebijakan Taliban terhadap perempuan Afghanistan (Afghan Women's Network 2023, 9–10). Strategi yang digunakan kedua pihak

menunjukkan adanya perbedaan mendasar dalam cara mencapai tujuan masing-masing. Dalam perspektif Stroup, perbedaan tujuan yang disertai dengan perbedaan strategi merupakan karakteristik utama pola *conflict* (Stroup 2012, 33). Oleh karena itu, hubungan Taliban dan NGO dalam isu perempuan tidak hanya menunjukkan perbedaan kepentingan, tetapi juga perbedaan metode perjuangan.

Pola *conflict* juga terlihat dalam hubungan Taliban dengan Women for Afghan Women, khususnya terkait pengelolaan shelter atau pusat perlindungan perempuan. Sebelum Taliban kembali berkuasa, WAW mengelola berbagai shelter yang memberikan perlindungan bagi perempuan korban kekerasan domestik, pernikahan paksa, dan berbagai bentuk kekerasan berbasis gender (Women for Afghan Women 2023, 7–8). Namun setelah tahun 2021, banyak shelter menghadapi tekanan dan pembatasan operasional yang signifikan. Menurut laporan United States Institute of Peace, sejumlah pejabat Taliban memandang shelter perempuan sebagai institusi yang memungkinkan perempuan hidup di luar otoritas keluarga laki-laki dan karena itu dianggap tidak sesuai dengan tatanan sosial yang ingin mereka bangun (United States Institute of Peace 2022, 5–7). Pandangan tersebut menunjukkan bahwa konflik yang terjadi bukan sekadar persoalan administratif, melainkan berakar pada perbedaan nilai dan ideologi. WAW memandang shelter sebagai mekanisme perlindungan hak perempuan, sedangkan Taliban memandangnya sebagai institusi yang bertentangan dengan norma sosial yang mereka anut. Dengan demikian, konflik dalam kasus shelter mencerminkan pertentangan tujuan yang lebih mendasar antara kedua aktor.

Pola *conflict* juga terlihat dari respons Taliban terhadap aktivisme perempuan dan organisasi masyarakat sipil. Setelah Taliban mengambil alih kekuasaan, sejumlah kelompok perempuan melakukan demonstrasi untuk menuntut hak pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi dalam kehidupan publik. Human Rights Watch melaporkan bahwa sejumlah aktivis perempuan mengalami intimidasi, ancaman, penahanan, dan pengawasan setelah terlibat dalam aksi protes terkait hak perempuan (Human Rights Watch 2023, 17–18). Banyak aktivis tersebut memiliki hubungan dengan jaringan organisasi perempuan yang memperjuangkan kesetaraan gender di Afghanistan. Dari perspektif Taliban, aktivitas tersebut dipandang sebagai bentuk perlawanan terhadap kebijakan pemerintah. Sebaliknya, NGO memandang advokasi dan demonstrasi damai sebagai bagian dari upaya memperjuangkan hak-hak perempuan yang dilindungi oleh norma hak asasi manusia internasional. Perbedaan cara pandang ini semakin memperkuat hubungan konflikual antara Taliban dan NGO. Konflik yang muncul tidak hanya terjadi pada tingkat kebijakan, tetapi juga pada tingkat ruang publik dan partisipasi masyarakat sipil.

Faktor *issue area* menjadi salah satu penyebab utama dominannya pola *conflict* dalam hubungan Taliban dan NGO. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, isu perempuan merupakan isu yang sangat sensitif karena berkaitan dengan identitas ideologis dan legitimasi politik Taliban. Berbagai kebijakan yang diterapkan terhadap perempuan dipandang oleh Taliban sebagai bagian dari implementasi nilai-nilai Islam yang mereka yakini (TOLONews 2023). Akibatnya, organisasi yang memperjuangkan perubahan kebijakan tersebut cenderung dipandang sebagai pihak yang menantang otoritas negara. Dalam konteks ini,

konflik bukan hanya muncul karena perbedaan kepentingan praktis, tetapi juga karena adanya pertentangan nilai yang mendasar. Temuan ini sejalan dengan argumentasi Stroup bahwa isu yang berkaitan dengan identitas dan nilai cenderung menghasilkan hubungan yang lebih konfliktnal antara negara dan NGO (Stroup 2012, 33). Oleh karena itu, karakteristik isu perempuan menjadi faktor yang sangat penting dalam menjelaskan munculnya pola *conflict*.

Selain *issue area*, faktor *NGO characteristics* dan *state characteristics* juga berkontribusi terhadap munculnya konflik. Afghan Women's Network memiliki karakteristik sebagai organisasi advokasi yang secara aktif mengkritik kebijakan Taliban dan mendorong perubahan sosial yang lebih luas. Pada saat yang sama, Taliban memiliki karakteristik sebagai rezim *authoritarian-theocratic* yang cenderung membatasi ruang gerak organisasi yang dianggap mengancam legitimasi politik maupun ideologinya (International Crisis Group 2022, 7–8). Kombinasi kedua karakteristik tersebut menciptakan kondisi yang memperbesar kemungkinan terjadinya konflik. Organisasi yang aktif melakukan advokasi berhadapan dengan negara yang memiliki kecenderungan untuk mengontrol ruang publik dan aktivitas masyarakat sipil. Dengan demikian, konflik yang terjadi tidak hanya dipengaruhi oleh isu yang diperjuangkan, tetapi juga oleh karakteristik kedua aktor yang terlibat. Faktor-faktor tersebut saling memperkuat satu sama lain dalam membentuk pola hubungan yang konfliktnal.

3.2.2 Pola Cooperation

Menurut Sarah S. Stroup, pola *cooperation* muncul ketika negara dan NGO menemukan titik temu kepentingan sehingga keduanya dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu meskipun tetap memiliki perbedaan dalam aspek lain (Stroup 2012, 34). Dalam pola ini, hubungan antara negara dan NGO tidak didasarkan pada kesamaan ideologi atau nilai secara menyeluruh, melainkan pada adanya kebutuhan bersama yang mendorong kedua pihak untuk berinteraksi secara pragmatis. Kerja sama dapat terjadi ketika negara membutuhkan kapasitas, sumber daya, atau layanan yang dimiliki NGO, sementara NGO membutuhkan akses dan dukungan negara untuk menjalankan programnya. Dalam konteks Afghanistan pasca 2021, meskipun hubungan Taliban dan NGO perempuan didominasi oleh konflik, terdapat sejumlah kondisi yang memungkinkan terjadinya kerja sama terbatas. Kerja sama tersebut terutama muncul pada sektor-sektor kemanusiaan yang dianggap penting bagi stabilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pola *cooperation* dalam hubungan Taliban dan NGO lebih didorong oleh kebutuhan praktis dibandingkan kesamaan pandangan mengenai hak perempuan. Temuan ini sejalan dengan argumentasi Stroup bahwa kerja sama dapat muncul meskipun terdapat perbedaan nilai yang cukup besar antara negara dan NGO.

Salah satu bentuk kerja sama yang paling jelas terlihat adalah dalam distribusi bantuan kemanusiaan kepada masyarakat yang terdampak krisis ekonomi. Setelah Taliban kembali berkuasa pada tahun 2021, Afghanistan menghadapi peningkatan angka kemiskinan, pengangguran, dan kerawanan

pangan yang signifikan. Menurut laporan *World Food Programme* (WFP), jutaan warga Afghanistan bergantung pada bantuan pangan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari akibat memburuknya kondisi ekonomi nasional (WFP 2023, 2–4). Dalam situasi tersebut, berbagai NGO internasional dan lokal tetap menjalankan program distribusi bantuan pangan dengan koordinasi tertentu bersama otoritas Taliban. Taliban mengizinkan program tersebut karena bantuan yang diberikan mampu mengurangi tekanan sosial dan ekonomi yang dihadapi masyarakat. Sementara itu, NGO membutuhkan akses wilayah yang hanya dapat diberikan oleh otoritas lokal Taliban agar distribusi bantuan dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Dengan demikian, kedua pihak memiliki kepentingan yang saling melengkapi dalam upaya mengatasi krisis kemanusiaan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesamaan tujuan praktis yang menjadi dasar munculnya pola *cooperation*.

Kerja sama juga terlihat dalam pelaksanaan program bantuan musim dingin yang dijalankan berbagai organisasi kemanusiaan. Afghanistan merupakan negara yang memiliki musim dingin ekstrem di sejumlah wilayah pegunungan sehingga bantuan bahan bakar, pakaian hangat, dan kebutuhan dasar lainnya sangat penting bagi masyarakat rentan. TOLONews melaporkan bahwa sejumlah organisasi kemanusiaan tetap menyalurkan bantuan musim dingin ke berbagai provinsi Afghanistan melalui koordinasi dengan otoritas lokal Taliban (TOLONews 2023). Dalam konteks ini, Taliban berkepentingan menjaga stabilitas sosial dan mencegah memburuknya kondisi kemanusiaan yang dapat menimbulkan ketidakpuasan masyarakat. Di sisi lain, NGO membutuhkan jaminan keamanan dan akses distribusi agar bantuan dapat disalurkan secara

efektif. Meskipun kedua pihak memiliki pandangan yang berbeda mengenai berbagai isu politik dan sosial, mereka tetap menemukan ruang kerja sama dalam menghadapi kebutuhan mendesak masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kerja sama tidak selalu memerlukan kesamaan ideologi, tetapi dapat muncul karena adanya kepentingan bersama terhadap hasil yang ingin dicapai. Oleh karena itu, program bantuan musim dingin menjadi salah satu contoh konkret pola *cooperation* antara Taliban dan NGO.

Selain bantuan pangan dan bantuan musim dingin, kerja sama juga muncul dalam sektor kesehatan. Sektor kesehatan merupakan salah satu bidang yang relatif lebih terbuka bagi interaksi antara Taliban dan NGO karena layanan kesehatan dipandang sebagai kebutuhan dasar masyarakat. Menurut *World Health Organization* (WHO), banyak fasilitas kesehatan di Afghanistan tetap dapat beroperasi setelah tahun 2021 berkat dukungan NGO dan organisasi kemanusiaan yang menyediakan tenaga medis, obat-obatan, serta dukungan operasional lainnya (WHO 2023, 12–13). Taliban menyadari bahwa kapasitas negara untuk menyediakan layanan kesehatan masih sangat terbatas sehingga keberadaan NGO menjadi penting untuk menjaga keberlangsungan pelayanan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, meskipun Taliban menerapkan berbagai pembatasan terhadap perempuan, mereka tetap memberikan pengecualian tertentu bagi tenaga kesehatan perempuan dalam beberapa program kesehatan. Kebijakan tersebut menunjukkan adanya kompromi pragmatis yang memungkinkan program kesehatan tetap berjalan. Dalam perspektif Stroup, kondisi ini mencerminkan pola *cooperation* karena kedua aktor bekerja menuju tujuan yang relatif sama, yaitu menjaga kesehatan dan kesejahteraan masyarakat (Stroup 2012, 34).

Kerja sama dalam sektor kesehatan juga terlihat dalam program yang dijalankan Medica Afghanistan. Sebagai organisasi yang berfokus pada kesehatan mental dan dukungan psikososial bagi perempuan, Medica Afghanistan tetap berupaya memberikan layanan kepada kelompok rentan setelah Taliban kembali berkuasa. Meskipun menghadapi berbagai pembatasan, organisasi ini masih dapat menjalankan sebagian programnya karena layanan kesehatan mental dipandang sebagai kebutuhan kemanusiaan yang penting (Medica Mondiale 2023, 10–11). Dalam beberapa wilayah, Medica Afghanistan melakukan koordinasi dan negosiasi dengan otoritas lokal Taliban agar program konseling dan dukungan psikososial dapat tetap berjalan. Taliban pada akhirnya memberikan ruang operasional terbatas karena layanan tersebut membantu memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak dapat sepenuhnya dipenuhi oleh negara. Situasi ini menunjukkan bahwa kerja sama yang terjadi tidak didasarkan pada kesamaan pandangan mengenai kesetaraan gender, melainkan pada kebutuhan untuk menyediakan layanan kesehatan bagi masyarakat. Dengan demikian, hubungan antara Taliban dan Medica Afghanistan menunjukkan karakteristik pola *cooperation* yang bersifat pragmatis.

Pola kerja sama juga dapat ditemukan dalam beberapa aktivitas Women for Afghan Women setelah tahun 2021. Meskipun organisasi ini menghadapi konflik terkait perlindungan perempuan dan penutupan shelter, tidak semua program WAW dihentikan sepenuhnya. Women for Afghan Women melakukan berbagai penyesuaian strategi agar sebagian layanan kemanusiaan tetap dapat diberikan kepada perempuan dan keluarga yang membutuhkan bantuan (Women for Afghan Women 2023, 10–12). Dalam beberapa kasus, organisasi tersebut

mengurangi visibilitas publik program dan meningkatkan kerja sama dengan komunitas lokal untuk mempertahankan akses terhadap kelompok penerima manfaat. Taliban mengizinkan sebagian program berjalan karena bantuan yang diberikan berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, WAW memilih mempertahankan pendekatan yang lebih adaptif agar tetap dapat menjalankan misi kemanusiaannya. Situasi ini menunjukkan bahwa hubungan Taliban dan WAW tidak selalu berada dalam kondisi konflik terbuka, tetapi juga dapat menghasilkan kerja sama terbatas pada sektor tertentu. Oleh karena itu, pola hubungan antara kedua aktor bersifat dinamis dan bergantung pada konteks program yang dijalankan.

Munculnya pola *cooperation* dalam hubungan Taliban dan NGO sangat dipengaruhi oleh faktor *resource flows*. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Taliban membutuhkan bantuan internasional untuk mengatasi berbagai permasalahan sosial dan ekonomi yang terjadi setelah tahun 2021. Sementara itu, NGO membutuhkan akses lapangan yang dikendalikan oleh Taliban agar bantuan dapat disalurkan kepada masyarakat. Ketergantungan timbal balik tersebut menciptakan insentif bagi kedua pihak untuk mempertahankan bentuk kerja sama tertentu meskipun terdapat perbedaan ideologi yang mendasar. Selain *resource flows*, faktor *issue area* juga berperan dalam membentuk kerja sama. Sektor kesehatan dan bantuan kemanusiaan cenderung menghasilkan kerja sama karena isu tersebut dipandang sebagai kebutuhan dasar yang relatif kurang sensitif dibandingkan isu kesetaraan gender atau partisipasi politik perempuan. Dengan demikian, kerja sama tidak muncul secara kebetulan, tetapi merupakan hasil dari kombinasi berbagai faktor yang membentuk hubungan antara Taliban dan NGO.

3.2.3 Pola Cooptation

Pola *cooptation* terjadi ketika negara tidak sepenuhnya menolak keberadaan NGO, tetapi berupaya mengendalikan, mengarahkan, atau membatasi aktivitas NGO agar tetap sesuai dengan kepentingan negara (Stroup 2012, 35). Dalam pola ini, NGO tetap dapat beroperasi, namun ruang geraknya dipengaruhi oleh aturan, regulasi, dan mekanisme kontrol yang ditetapkan negara. Berbeda dengan pola *conflict* yang ditandai oleh pertentangan terbuka, atau *cooperation* yang didasarkan pada tujuan yang relatif sejalan, pola *cooptation* ditandai oleh adanya hubungan yang tetap berlangsung tetapi dalam kondisi yang tidak sepenuhnya setara. Negara berusaha mempertahankan kontrol terhadap aktivitas NGO, sementara NGO melakukan berbagai penyesuaian agar tetap dapat menjalankan programnya. Dalam konteks Afghanistan pasca 2021, hubungan antara Taliban dan NGO menunjukkan berbagai karakteristik yang sesuai dengan pola *cooptation*. Taliban tidak menghapus seluruh aktivitas NGO yang bekerja pada isu perempuan, tetapi berusaha memastikan bahwa aktivitas tersebut berjalan dalam batas-batas yang dapat mereka kendalikan. Oleh karena itu, pola *cooptation* menjadi salah satu bentuk interaksi penting yang muncul dalam hubungan Taliban dan NGO selama periode penelitian.

Salah satu indikator utama pola *cooptation* adalah penerapan berbagai regulasi yang mengontrol aktivitas NGO. Setelah kembali berkuasa, Taliban memperkenalkan berbagai kebijakan yang mengatur ruang gerak organisasi kemanusiaan dan masyarakat sipil di Afghanistan. NGO diwajibkan berkoordinasi dengan otoritas Taliban dalam pelaksanaan program, perekrutan staf, serta

distribusi bantuan kepada masyarakat (OCHA 2024, 6–7). Dalam banyak kasus, organisasi yang ingin mempertahankan operasinya harus menyesuaikan mekanisme kerja mereka dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah *de facto*. Taliban tidak melarang seluruh aktivitas NGO, tetapi berupaya memastikan bahwa kegiatan organisasi tidak bertentangan dengan kebijakan negara. Situasi ini menunjukkan bahwa hubungan yang terjadi bukan sekadar kerja sama biasa, melainkan hubungan yang diwarnai oleh kontrol negara terhadap aktivitas NGO. Dalam perspektif Stroup, kondisi tersebut merupakan karakteristik utama dari pola *cooptation* (Stroup 2012, 35).

Pola *cooptation* juga terlihat dalam kebijakan Taliban terkait pekerja perempuan di sektor NGO. Pada Desember 2022, Taliban mengumumkan larangan bagi perempuan untuk bekerja di berbagai NGO nasional maupun internasional dengan alasan adanya pelanggaran terhadap aturan berpakaian dan norma yang ditetapkan pemerintah (UN Women 2023, 9). Kebijakan tersebut sempat mengganggu berbagai program kemanusiaan karena banyak organisasi bergantung pada staf perempuan untuk menjangkau penerima manfaat perempuan. Namun dalam praktiknya, Taliban kemudian memberikan pengecualian terbatas bagi beberapa sektor tertentu, terutama kesehatan dan layanan kemanusiaan yang dianggap penting (WHO 2023, 13). Pengecualian tersebut tidak diberikan secara bebas, melainkan melalui berbagai persyaratan dan pengawasan yang ketat. Kondisi ini menunjukkan bahwa Taliban tidak sepenuhnya menolak keterlibatan NGO, tetapi berusaha menentukan batas-batas yang dapat diterima oleh negara. Dengan demikian, hubungan yang terbentuk lebih tepat dipahami sebagai kooptasi

dibandingkan konflik murni karena NGO tetap dapat beroperasi meskipun berada di bawah kontrol negara.

Karakteristik pola *cooptation* juga dapat dilihat dari mekanisme pengawasan terhadap distribusi bantuan kemanusiaan. Menurut laporan Afghanistan Analysts Network, di sejumlah wilayah Afghanistan, NGO harus melakukan koordinasi dengan pejabat lokal Taliban sebelum mendistribusikan bantuan kepada masyarakat (Afghanistan Analysts Network 2023, 26–27). Dalam beberapa kasus, Taliban turut menentukan prosedur pelaksanaan program dan pihak-pihak yang dapat terlibat dalam proses distribusi bantuan. Melalui mekanisme tersebut, Taliban memperoleh pengaruh terhadap aliran bantuan yang masuk ke masyarakat. Bagi NGO, mengikuti prosedur tersebut sering kali menjadi syarat untuk mempertahankan akses terhadap wilayah operasional mereka. Meskipun organisasi tetap menjalankan programnya, ruang pengambilan keputusan mereka menjadi lebih terbatas dibandingkan sebelumnya. Situasi ini mencerminkan upaya negara untuk mengarahkan aktivitas NGO tanpa harus menutup seluruh program yang dijalankan. Oleh karena itu, kontrol terhadap distribusi bantuan menjadi salah satu bentuk nyata dari pola *cooptation*.

Pola kooptasi juga terlihat dalam strategi adaptasi yang dilakukan Women for Afghan Women setelah Taliban kembali berkuasa. Sebagai organisasi yang sebelumnya mengelola shelter dan berbagai program perlindungan perempuan, WAW menghadapi tantangan besar akibat perubahan kebijakan pemerintah. Untuk mempertahankan sebagian layanan kemanusiaan, organisasi ini melakukan berbagai penyesuaian terhadap model operasionalnya, termasuk memperkuat kerja

berbasis komunitas dan mengubah mekanisme pemberian bantuan agar sesuai dengan kondisi politik yang berkembang (Women for Afghan Women 2023, 10–12). Penyesuaian tersebut menunjukkan bahwa WAW tidak sepenuhnya menghentikan aktivitasnya, tetapi menyesuaikan program agar tetap dapat diterima oleh otoritas Taliban. Dalam konteks ini, Taliban berhasil memengaruhi cara organisasi menjalankan programnya tanpa harus menghapus keberadaan organisasi tersebut. Oleh karena itu, hubungan antara Taliban dan WAW dalam beberapa aspek menunjukkan karakteristik kooptasi. Situasi ini berbeda dengan konflik terkait penutupan shelter yang lebih mencerminkan pertentangan terbuka mengenai nilai dan tujuan kedua aktor.

Karakteristik serupa juga terlihat pada Medica Afghanistan. Organisasi ini tetap menjalankan program kesehatan mental dan dukungan psikososial bagi perempuan setelah tahun 2021, tetapi harus menyesuaikan berbagai aspek operasional agar sesuai dengan regulasi yang ditetapkan Taliban (Medica Mondiale 2023, 10–11). Dalam beberapa kasus, layanan diberikan melalui pendekatan berbasis komunitas yang lebih fleksibel dan tidak terlalu terlihat secara publik. Penyesuaian tersebut memungkinkan organisasi mempertahankan akses terhadap kelompok perempuan yang membutuhkan bantuan. Namun di sisi lain, kondisi tersebut juga menunjukkan bahwa ruang gerak organisasi dipengaruhi oleh preferensi dan aturan yang ditetapkan negara. Taliban tidak menghapus seluruh aktivitas organisasi, tetapi berhasil membentuk cara organisasi tersebut beroperasi. Dalam perspektif Stroup, kondisi seperti ini merupakan salah satu bentuk kooptasi karena negara mampu mengarahkan aktivitas NGO tanpa perlu melakukan pelarangan total (Stroup 2012, 35).

Penting untuk dibedakan bahwa tidak semua pembatasan yang dilakukan Taliban secara otomatis merupakan bentuk *conflict*. Revisi dosen mengenai perbedaan antara kooptasi dan konflik dapat dijelaskan melalui tujuan dan hasil interaksi yang terjadi. Konflik terjadi ketika negara dan NGO memiliki tujuan yang saling bertentangan dan berupaya menghambat pencapaian tujuan pihak lain. Sebaliknya, kooptasi terjadi ketika negara tetap mengizinkan NGO beroperasi, tetapi dengan syarat NGO menyesuaikan aktivitasnya dengan aturan negara. Dalam kasus larangan kerja perempuan di NGO misalnya, apabila Taliban menutup seluruh aktivitas NGO perempuan secara permanen, maka kondisi tersebut lebih dekat dengan pola *conflict*. Namun ketika Taliban tetap mengizinkan sebagian program berjalan melalui pengecualian dan mekanisme kontrol tertentu, hubungan tersebut lebih tepat dikategorikan sebagai *cooptation*. Dengan demikian, indikator utama kooptasi bukanlah keberadaan pembatasan itu sendiri, melainkan kemampuan negara untuk memengaruhi dan mengarahkan aktivitas NGO tanpa menghapus eksistensinya secara keseluruhan.

Munculnya pola *cooptation* dalam hubungan Taliban dan NGO dipengaruhi oleh kombinasi berbagai faktor yang telah dibahas sebelumnya. Dari sisi *state characteristics*, Taliban memiliki karakter sebagai rezim yang berupaya mempertahankan kontrol terhadap ruang publik dan aktivitas masyarakat sipil. Dari sisi *resource flows*, Taliban membutuhkan bantuan kemanusiaan yang dibawa NGO sehingga tidak dapat sepenuhnya menutup aktivitas organisasi tersebut. Dari sisi *issue area*, isu perempuan dianggap sensitif sehingga Taliban berusaha memastikan bahwa program-program yang berkaitan dengan perempuan tetap berada dalam batas yang sesuai dengan interpretasi mereka terhadap syariah.

Sementara itu, dari sisi *NGO characteristics*, organisasi seperti WAW dan Medica Afghanistan memilih melakukan adaptasi agar tetap dapat memberikan layanan kepada masyarakat. Interaksi berbagai faktor tersebut menciptakan kondisi yang memungkinkan negara mengendalikan aktivitas NGO tanpa menghilangkan keberadaan mereka. Oleh karena itu, pola *cooptation* menjadi salah satu bentuk interaksi yang penting dalam menjelaskan hubungan Taliban dan NGO selama periode 2021–2025.

BAB 4

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan ditemukan bahwa hubungan antara kedua aktor tidak bersifat tunggal, melainkan menunjukkan dinamika yang kompleks dan menghasilkan pola *conflict*, *cooperation*, dan *cooptation*. Pola-pola tersebut terbentuk karena adanya interaksi antara karakteristik isu yang diperjuangkan, karakteristik organisasi NGO, karakteristik pemerintahan Taliban, serta kebutuhan terhadap sumber daya yang dimiliki masing-masing pihak. Dengan menggunakan teori *NGO-State Interactions* yang dikemukakan oleh Sarah S. Stroup, penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antara Taliban dan NGO tidak hanya dipengaruhi oleh perbedaan ideologi, tetapi juga oleh kebutuhan praktis yang muncul dalam konteks krisis kemanusiaan Afghanistan pasca pengambilalihan kekuasaan oleh Taliban pada tahun 2021.

Faktor pertama yang membentuk pola interaksi tersebut adalah *issue area*. Isu diskriminasi terhadap perempuan di Afghanistan merupakan isu yang memiliki sensitivitas politik dan ideologis yang tinggi karena berkaitan langsung dengan legitimasi pemerintahan Taliban. Taliban memandang kebijakan pembatasan terhadap perempuan sebagai bagian dari penerapan sistem sosial dan keagamaan yang menjadi dasar Emirat Islam Afghanistan. Sebaliknya, NGO seperti Women for Afghan Women (WAW), Afghan Women's Network (AWN), dan Medica Afghanistan memandang bahwa perempuan memiliki hak untuk

memperoleh pendidikan, pekerjaan, perlindungan dari kekerasan, dan partisipasi dalam kehidupan publik. Perbedaan cara pandang tersebut menyebabkan isu perempuan menjadi arena pertentangan nilai antara Taliban dan NGO. Oleh karena itu, karakteristik isu yang sangat sensitif menjadi faktor utama yang mendorong munculnya hubungan yang lebih konfliktual dibandingkan isu-isu kemanusiaan lainnya.

Faktor kedua adalah *NGO characteristics*. Penelitian ini menemukan bahwa karakteristik organisasi yang berbeda menghasilkan pola interaksi yang berbeda pula dengan Taliban. Afghan Women's Network memiliki karakteristik sebagai organisasi advokasi yang secara aktif memperjuangkan hak perempuan dan mengkritik berbagai kebijakan diskriminatif Taliban. Karakteristik tersebut menyebabkan AWN lebih sering terlibat dalam hubungan yang bersifat konfliktual dengan Taliban. Sementara itu, Medica Afghanistan yang lebih berfokus pada layanan kesehatan mental dan dukungan psikososial memiliki ruang interaksi yang relatif lebih besar karena program yang dijalankannya dianggap sebagai kebutuhan kemanusiaan. Women for Afghan Women berada di antara kedua karakteristik tersebut karena menggabungkan fungsi advokasi dan penyediaan layanan perlindungan perempuan. Perbedaan tujuan, strategi, dan fokus program masing-masing NGO menunjukkan bahwa karakteristik organisasi merupakan faktor penting yang memengaruhi bentuk hubungan yang berkembang dengan Taliban.

Faktor ketiga adalah *state characteristics*. Karakter Taliban sebagai rezim *authoritarian-theocratic* sangat memengaruhi pola interaksi yang terbentuk

dengan NGO. Taliban memiliki kecenderungan untuk mengontrol ruang publik dan membatasi aktivitas organisasi masyarakat sipil yang dianggap bertentangan dengan tujuan politik maupun ideologinya. Berbagai kebijakan yang membatasi pendidikan, pekerjaan, mobilitas, dan partisipasi perempuan menunjukkan bahwa pemerintah Taliban menjadikan isu perempuan sebagai bagian dari legitimasi ideologis negara. Kondisi tersebut menyebabkan organisasi yang memperjuangkan kesetaraan gender sering dipandang sebagai pihak yang menantang otoritas negara. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa Taliban tidak sepenuhnya menutup ruang bagi NGO. Dalam sektor tertentu seperti kesehatan dan bantuan kemanusiaan, Taliban menunjukkan sikap yang lebih pragmatis karena menyadari keterbatasan kapasitas negara dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, karakteristik negara tidak hanya menjelaskan munculnya konflik, tetapi juga menjelaskan mengapa kerja sama dan kooptasi tetap dapat terjadi.

Faktor keempat adalah *resource flows*. Penelitian ini menemukan bahwa kebutuhan terhadap sumber daya menjadi salah satu faktor yang memungkinkan hubungan antara Taliban dan NGO tetap berlangsung meskipun terdapat perbedaan ideologi yang mendasar. Setelah tahun 2021, Afghanistan menghadapi krisis kemanusiaan yang menyebabkan jutaan masyarakat bergantung pada bantuan internasional. Dalam kondisi tersebut, Taliban membutuhkan bantuan yang disalurkan melalui NGO untuk menjaga stabilitas sosial dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, NGO membutuhkan akses wilayah, izin operasional, dan jaminan keamanan yang dikendalikan oleh Taliban agar program mereka dapat berjalan. Hubungan saling ketergantungan tersebut menciptakan

ruang bagi munculnya kerja sama dan kooptasi. Dengan demikian, *resource flows* menjadi faktor yang menjelaskan mengapa hubungan Taliban dan NGO tidak sepenuhnya didominasi oleh konflik.

Berkaitan dengan pola interaksi, penelitian ini menemukan bahwa pola *conflict* merupakan pola yang paling dominan dalam hubungan antara Taliban dan NGO selama periode 2021–2025. Pola ini muncul karena adanya perbedaan tujuan (*ends*) dan strategi (*means*) antara kedua aktor. Taliban berupaya mempertahankan kebijakan yang membatasi perempuan berdasarkan interpretasi syariah yang mereka yakini, sedangkan NGO berupaya memperjuangkan perlindungan hak perempuan dan kesetaraan gender. Konflik tersebut terlihat dalam isu pendidikan perempuan, pembatasan terhadap perempuan untuk bekerja, intimidasi terhadap aktivis perempuan, serta penutupan berbagai shelter yang sebelumnya dikelola NGO. Penutupan shelter menunjukkan bahwa konflik tidak hanya berkaitan dengan persoalan administratif, tetapi juga berakar pada perbedaan nilai dan ideologi antara Taliban dan NGO mengenai posisi perempuan dalam masyarakat. Oleh karena itu, pola *conflict* menjadi pola yang paling menonjol dalam hubungan kedua aktor.

Meskipun konflik mendominasi hubungan antara Taliban dan NGO, penelitian ini juga menemukan adanya pola *cooperation*. Pola kerja sama muncul terutama dalam sektor bantuan kemanusiaan dan kesehatan yang dianggap sebagai kebutuhan dasar masyarakat Afghanistan. Kerja sama terlihat dalam distribusi bantuan pangan, bantuan musim dingin, layanan kesehatan, serta berbagai program kemanusiaan yang tetap dijalankan oleh NGO setelah Taliban kembali

berkuasa. Dalam konteks ini, Taliban dan NGO memiliki tujuan yang relatif sejalan, yaitu membantu masyarakat yang terdampak krisis kemanusiaan. Taliban membutuhkan kapasitas dan sumber daya yang dimiliki NGO, sementara NGO membutuhkan akses yang dikendalikan oleh Taliban untuk menjangkau masyarakat. Dengan demikian, kerja sama yang terjadi lebih bersifat pragmatis dan didorong oleh kebutuhan praktis daripada kesamaan pandangan mengenai hak perempuan.

Selain konflik dan kerja sama, penelitian ini juga menemukan adanya pola *cooptation* dalam hubungan antara Taliban dan NGO. Pola ini terlihat ketika Taliban tidak sepenuhnya menolak keberadaan NGO, tetapi berupaya mengontrol dan mengarahkan aktivitas mereka melalui berbagai regulasi dan pembatasan operasional. Pengawasan terhadap distribusi bantuan, pembatasan terhadap pekerja perempuan, kewajiban koordinasi dengan otoritas lokal, serta berbagai bentuk penyesuaian program yang dilakukan NGO menunjukkan adanya upaya negara untuk mempertahankan kontrol terhadap aktivitas organisasi masyarakat sipil. Dalam kondisi ini, NGO tetap dapat menjalankan programnya, tetapi harus menyesuaikan diri dengan aturan yang ditetapkan Taliban. Oleh karena itu, pola *cooptation* menunjukkan bahwa hubungan antara Taliban dan NGO tidak selalu berbentuk pertentangan terbuka, melainkan juga dapat berupa hubungan yang memungkinkan organisasi tetap beroperasi di bawah pengaruh dan kontrol negara.

4.2 Rekomendasi

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas sumber data dengan menggunakan lebih banyak sumber lokal Afghanistan seperti media domestik, dokumen kebijakan Taliban, dan wawancara langsung dengan aktivis perempuan atau pekerja NGO di Afghanistan. Penelitian selanjutnya juga disarankan menggunakan metode penelitian lapangan atau wawancara mendalam untuk memperoleh data yang lebih detail mengenai dampak kebijakan Taliban terhadap perempuan Afghanistan. Dengan demikian, penelitian mengenai hubungan Taliban dan NGO dapat terus berkembang dan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika masyarakat sipil di Afghanistan pasca 2021.

DAFTAR PUSTAKA

- Afghan Women's Network. 2023. Annual Report 2023. Kabul: Afghan Women's Network.
- Afghanistan Analysts Network. 2023. Reports on Women and Civil Society in Afghanistan. Kabul: Afghanistan Analysts Network.
- Ahmed, Shamima, dan David M. Potter. 2006. NGOs in International Politics. Bloomfield: Kumarian Press.
- Al Jazeera. 2022. "Taliban Defends Restrictions on Women in Afghanistan." Al Jazeera, 2022.
- Amnesty International. 2023. The Taliban's War on Women: The Crime Against Humanity of Gender Persecution in Afghanistan. London: Amnesty International.
- Azizah, Nur, dan Fahriyya Noor Ahsana. 2023. "The Role of UN Women in Addressing Women's Rights in Afghanistan under Taliban." Journal of International Studies.
- Coston, Jennifer M. 1998. "A Model and Typology of Government-NGO Relationships." Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly 27 (3): 358–82.
- Giustozzi, Antonio. 2019. The Taliban at War: 2001–2018. London: Hurst & Company.
- Human Rights Watch. 2001. Afghanistan: Women under the Taliban. New York: Human Rights Watch.
- Human Rights Watch. 2022. Afghanistan under Taliban Rule: Women's Rights and Restrictions. New York: Human Rights Watch.
- Human Rights Watch. 2023. Afghanistan: Taliban Restrictions on Women and Girls. New York: Human Rights Watch.
- International Crisis Group. 2022. Afghanistan's Taliban-Led Order: Political Structure and Challenges. Brussels: International Crisis Group.
- International Labour Organization. 2018. Women and Men in the Informal Economy: A Statistical Picture. Geneva: International Labour Organization.
- Jackson, Ashley. 2023. The Taliban's Political Order in Afghanistan. London: Overseas Development Institute.
- Kaldor, Mary. 2013. Global Civil Society: An Answer to War. Cambridge: Polity Press.
- Medica Mondiale. 2023. Mental Health and Psychosocial Support for Women in Afghanistan. Cologne: Medica Mondiale.
- Pajhwok Afghan News. 2022. "Women Activists Face Restrictions under Taliban Rule." Pajhwok Afghan News, 2022.
- Pajhwok Afghan News. 2023. "NGO Operational Challenges under Taliban Administration." Pajhwok Afghan News, 2023.
- Qazi Zada, Sebghatullah, dan Mohd Ziaolhaq Qazi Zada. 2024. "The Taliban and Women's Human Rights in Afghanistan: The Way Forward." Journal of Human Rights Studies.
- Rashid, Ahmed. 2000. Taliban: Militant Islam, Oil and Fundamentalism in Central Asia. New Haven: Yale University Press.
- Reuters. 2022. "Taliban Ban Women from Working in NGOs." Reuters, December 2022.

- Safitri, Alya Ananda. 2024. "Legal Protection of Women's Rights in Afghanistan During Taliban Regime of 2021–2022 and the State Responsibility." *Jurnal Hukum Internasional*.
- Shahir, Shahira, Xiaoni Ren, dan Shaista Noor. 2024. "Silenced Voices, Enduring Struggles: An Islamic Feminist Analysis of Afghan Female Academics under Taliban Rule." *Journal of Gender Studies*.
- Stroup, Sarah S. 2019. "NGO's Interactions with States." Dalam *Routledge Handbook of NGOs and International Relations*, disunting oleh Thomas Davies. London: Routledge.
- TOLO News. 2021. "Taliban Policies toward Women after August 2021." TOLO News, 2021.
- TOLO News. 2022. "Girls' Schools Remain Closed in Afghanistan." TOLO News, 2022.
- TOLO News. 2023. "Women Continue Informal Education under Taliban Restrictions." TOLO News, 2023.
- UNAMA (United Nations Assistance Mission in Afghanistan). 2023. *Human Rights Situation in Afghanistan*. Kabul: UNAMA.
- UNDP (United Nations Development Programme). 2023. *Afghanistan Socio-Economic Outlook 2023*. New York: UNDP.
- UNESCO. 2023. *Afghanistan: Girls' and Women's Education under Taliban Rule*. Paris: UNESCO.
- UNFPA (United Nations Population Fund). 2023. *Afghanistan Humanitarian Response and Women's Health*. New York: UNFPA.
- UN Women. 2019. *Progress of the World's Women 2019–2020*. New York: UN Women.
- UN Women. 2021. *Women's Participation and Leadership in Afghanistan*. New York: UN Women.
- UN Women. 2023. *Gender Alert on Afghanistan*. New York: UN Women.
- Women for Afghan Women. 2023. *Annual Report 2023*. New York: Women for Afghan Women.
- World Bank. 2020. *Women, Business and the Law 2020*. Washington, DC: World Bank.
- World Bank. 2023. *Afghanistan Development Update*. Washington, DC: World Bank.
- World Health Organization. 2023. *Afghanistan Health Emergency Situation Report*. Geneva: World Health Organization.